



**LAPORAN KINERJA (LKj)
KECAMATAN BUMI MAKMUR
TAHUN 2023**

**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BUMI MAKMUR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas rahmat dan karunianya jumlah Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan sebuah laporan yang memuat penilaian kinerja berdasarkan tolok ukur Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Strategis (Renstra).

Untuk meningkatkan mutu penyajian Laporan Kinerja (LKj) pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut pada tahun berikutnya, senantiasa diharapkan saran dan kritik yang membangun serta partisipasi dari semua pihak terkait dalam rangka mendapatkan informasi penilaian kinerja yang akurat dan lebih baik lagi.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini, kami mengucapkan terimakasih. Semoga Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini dapat memberikan manfaat sebagai motivasi dalam rangka peningkatan kinerja bagi aparatur pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Bumi Makmur, 29 Januari 2024



SAHIDANOR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19661106 198601 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 merupakan wujud Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, serta pelaksanaan Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019. Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja kelima RPJMD 2018– 2023. Selain media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja ini jugamerupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

Sebagai perwujudan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bumi Makmur kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah menetapkan ukuran keberhasilannya berupa 1 sasaran yang diukur 1 Indikator kinerja Utama dan 2 sasaran strategis yang diukur dengan indikator kinerja sasaran sebanyak 2 indikator Kinerja, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis di atas.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 **Sangat Memuaskan**. Hal ini, didasarkan pada hasil pengukuran target terhadap pencapaian sasaran yang didukung dengan program / kegiatan dan berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2023 dan Penetapan Kinerja (PK) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **1 Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja Sangat memuaskan. Indikator kinerja program yang terdiri dari 2 sasaran dan 2 Indikator kinerja** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator

sementara adalah 95,15 %.

Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut pada Tahun 2023 tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Namun pada tahun 2023 dan seterusnya akan terus di tingkatkan akselerasinya dengan melakukan upaya yang lebih keras, cerdas dan terarah melalui percepatan pembangunan manusia dari aspek pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*), mendorong perbaikan instansi pemerintah yang akuntabel, beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, sertamenghasilkan umpan balik bagi pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang bermuara pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Bumi Makmur, 29 Januari 2024


CAHAYA BUMI MAKMUR,
SAHIDANOR, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP.19661106 198601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud Dan Tujuan	2
C. Dasar Hukum	2
D. Cascading Kinerja	5
E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi	5
F. Isu Strategis Perangkat Daerah	16
G. Dukungan Sdm Sarana Prasarana Dan Anggaran	18
H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya	22
I. Sistematika Penyajian.....	27
BAB II	29
PERENCANAAN KINERJA.....	29
A. VISI RPJMD	29
B. MISI.....	32
C. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH	32
D. PERJANJIAN KINERJA 2023	34
E. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA.....	39
BAB III	41
AKUNTABILITAS KINERJA	41
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI	41
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	108
BAB IV.....	112
PENUTUP	112
A. KESIMPULAN	112
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA	113
LAMPIRAN – LAMPIRAN	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan mutlak bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa serta bernegara. Dalam rangka itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi mengamanatkan bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi tujuan organisasi dan menetapkan tekad dan janji kinerja tahunan yang akan di capai oleh para pejabat di setiap instansi pemerintah, maka perlu disusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggungjawab manajerial pada tiap tingkatan dalam organisasi untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian secara efisien dan efektif. Masing-masing individu pada tiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya, sehingga kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai oleh pihak yang berkewenangan.

Dari pemahaman seperti itu dapat dirinci dalam butir-butir penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah antara lain yaitu :

1. Seberapa jauh efisiensi, efektivitas, produktivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2. Seberapa jauh kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, dengan kata lain apakah terjadi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Seberapa banyak (kuantitas) dan bagaimana mutu (kualitas) penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat.
4. Bagaimana dengan ketepatan lokasi serta waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur, sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Laporan ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan Pertanggung jawaban atas kinerja Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan di tahun 2023. Adapun tujuannya adalah Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Kecamatan Bumi Makmur untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh Stakeholders. Kedua, laporan kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Kecamatan Bumi Makmur sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

C. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5673);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
 13. Peraturan Menpan&Rb No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Sakip
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Nomor 1114 Tahun 2019);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 33);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

22. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 27);

D. Cascading Kinerja

Data Terlampir

E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi Dan Struktur Organisasi

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, antara lain :

1. Perijinan, dalam hal ini Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersil
2. Koordinasi dan fasilitasi
3. Pelayanan kepada masyarakat
4. Pembinaan kepada pemerintahan desa

Adapun jenis produk dan layanan yang ada pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur yang di laksanakan selama ini antara lain:

1. Pelayanan pembuatan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersil untuk bangunan permanen, semi permanen dan non permanen.
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Kematian, KIA
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Pelayanan pembuatan rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
5. Pelayanan pembuatan Surat Ijin Usaha
6. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris
7. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
8. Pelayanan pembuatan Surat Pengantar Pindah Keluar Kecamatan/Kabupaten
9. Pelayanan pengajuan subsidi listrik PLN
10. Pelayanan pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

11. Pelayanan pengajuan proposal untuk suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Untuk lebih meningkatkan produk dan layanan yang maksimal agar SKPD Kecamatan Bumi Makmur menjadi lebih baik, antara lain :

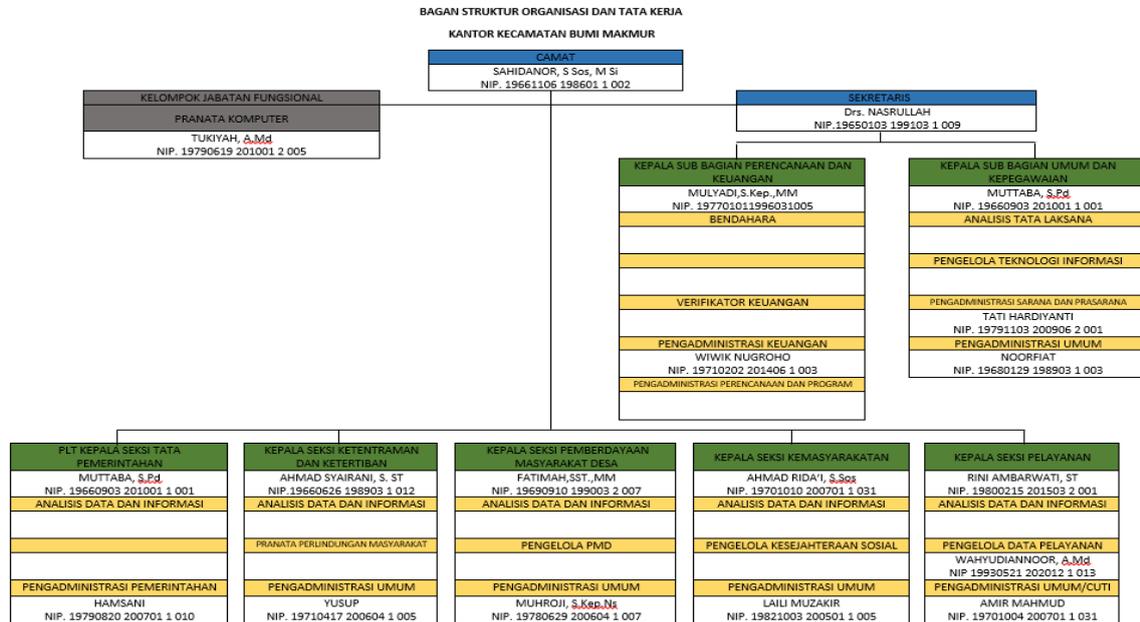
1. Pelayanan prima, Kecamatan Bumi Makmur sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Tanah Laut yang menyelenggarakan pelayanan Publik harus mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, gratis, memiliki legalitas hukum dan tentunya berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong perkembangan dinamika aktivitas masyarakat.
2. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah ideal dan memiliki persyaratan secara kuantitas, oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.

Pemanfaatan Peluang kebijakan penyerahan sebagian wewenang dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah, dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan Pemerintah, non Pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakatnya dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya Visi Kabupaten Tanah Laut.

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah, berdasarkan pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

Susunan organisasi SKPD Kecamatan Bumi Makmur terdiri dari ;

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi, terdiri dari :
 - a. Seksi Tata Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)
 - d. Seksi Kemasyarakatan
 - e. Seksi Pelayanan
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Camat

- 1) Mempunyai tugas :
 - a) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
 - b) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c) Mengoordinasikan upaya penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum;
 - d) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - h) Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah

yang ada di kecamatan; dan

- i) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.

2) Menyelenggarakan fungsi :

- a) Perencanaan kegiatan kecamatan
- b) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati
- c) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
- d) Pembinaan pemerintahan desa
- e) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa
- f) Penyelenggaraan tata usaha kecamatan
- g) Pengkoordinasian integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan di lingkungan kecamatan
- h) Pelaksanaan kerjasama dari koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya.

2. Sekretariat

1) Mempunyai tugas :

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, administrasi umum dan kepegawaian, serta ketatausahaan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Kecamatan
- b) Pemberian pelayanan administrasi kepada seksi - seksi lain dilingkungan Kecamatan

- c) Pengoordinasian penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Kecamatan
- d) Penyiapan peraturan perundang-undangan di bidang layanan sesuaidengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
- e) Penyelenggaraan urusan tata usaha, rumah tangga/perlengkapan
- f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan sertapenataan barang
- g) Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan
- h) Pengoordinasian pelaksanaan, pengumpulan dan penyusunan data, penilaian, pemantauan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan tugas, penyiapan dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Kecamatan
- i) Pengoordinasian urusan kedinasan yang menyangkut tata persuratan, pendataan dan pengumpulan bahan pelaporan kedinasan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
- k) Pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya

2) Menyelenggarakan fungsi :

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Bumi Makmur dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

a) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan.

b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan kepegawaian.

3. Seksi-seksi

Terdiri dari beberapa bagian dan fungsinya masing-masing, yaitu :

a. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.
- 2) Melaksanakan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Ketentraman dan ketertiban;
- 2) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban dalam wilayah kecamatan; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 2) Melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat desa
- 3) Melaksanakan pengembangan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa
- 4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya.

d. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kemasyarakatan;
- 2) Menyelenggarakan program kegiatan hubungan masyarakat kecamatan; Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dibidang kemasyarakatan, penyebaran dan pelayanan informasi; dan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan
- 2) Menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Kelompok Jabatan Fungsional :

- 1) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Camat
- 5) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja
- 6) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

7) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturanperundang-undangan

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Bumi Makmur hingga saat ini per 31 Desember 2023, memiliki PNS berjumlah 18 (Delapan belas)orang, namun 1 (satu) orang PNS Cuti menjadi Kepala Desa Handil Babirik dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 7 (tujuh) orang.

Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Bumi Makmur dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan ruang, jabatan struktural dan staf/pelaksana serta fungsional, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1 PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Ruang, Jabatan Struktural dan Fungsional

a. Tingkat Kualifikasi Pendidikan:		
-	Strata Dua (S.2)	:7 orang
-	Strata Satu (S.1)	:3 orang
-	Diploma Empat (D.IV)	:0 orang
-	Diploma Tiga (D.III)	:3 orang
-	Setingkat SLTA/ sederajat	:5 orang
b. Pangkat dan Golongan Ruang:		
-	Pembina Tingkat I (IV/b)	:1 orang
-	Pembina (IV/a)	:3 orang
-	Penata Tingkat I (III/d)	:2 orang
-	Penata (III/c)	:4 orang
-	Penata Muda Tingkat I (III/b)	:1 orang
-	Penata Muda (III/a)	:1 orang
-	Pengatur Tingkat I (II/d)	:1 orang
-	Pengatur (II/c)	:3 orang
-	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	:1 orang
-	Pengatur Muda (II/a)	:0 orang
-	Juru Tingkat I (I/d)	:0 orang
-	Juru (I/c)	:0 orang
-	Juru Muda Tingkat I (I/b)	:0 orang
-	Juru Muda (I/a)	:0 orang
c. Jabatan Struktural:		
-	Eselon III A (Camat)	:1 orang
-	Eselon III B (Sekretaris Camat)	:1 orang
-	Eselon IV A(Kepala Seksi)	:4 orang
-	Eselon IV B(Kepala Sub Bagian)	:2 orang
-	Staf/Pelaksana	:10 orang
-	Kelompok Jabatan Fungsional	:0 orang

Tabel 1.2. PNS Berdasarkan Tingkat Kualifikasi Pendidikan, Pengkat dan Golongan Ruang, Jabatan Struktural dan Fungsional

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN
1	SAHIDANOR, S.Sos.,M.Si NIP. 19661106 198601 1 002	Pembina Tingkat I IV/b	Camat	S2
2	GILANG PRADANA, STP,M.IP NIP. 19891025 201010 1 001	Penata III/c	Sekretaris Kecamatan	S2
3	FATIMAH, S.ST., MM NIP. 19690910 199003 2 007	Pembina IV/a	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S2
4	MULYADI, S. Kep, MM NIP. 19770101 199603 1 005	Pembina IV/a	Kepala Seksi Kemasyarakatan	S2
5	RINI AMBARWATI, ST, M.Sos NIP. 19800215 201503 3 001	Penata III/c	Kepala Seksi Pelayanan	S2
6	AHMAD SYAIRANI, S.ST NIP. 19660626 198903 1 012	Penata Tingkat I III/d	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	S1
7	ANGGA RAMADHAN NL,S.STP NIP. 19950227 201708 1 001	Penata III/c	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	S1
8	H. SULIMIN, S.Sos,MAP NIP. 19670424 199303 1 012	Pembina IV/a	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan	S2
9	TATI HARDIYANTI NIP. 19791103 200906 2 001	Pengatur II/c	Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pengadministrasi Sarana dan Prasarana padaSub Bag Umum dan Kepegawaian	DIII
10	YUSUP, S.Pd, MM 19710417 200604 1 005	Penata Tingkat I III/d	Pengadministrasi Umum pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban	S2
11	MUHROJI, S.Kep.Ns NIP. 19821003 200501 1 005	Penata III/c	Analisis Data dan Informasi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	S1
12	NOORFIAT NIP. 19680129 198903 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Pengadministrasi Umum pada Sub Bag Umum dan Kepegawaian	SLTA
13	HIDAYATULLAH, A.Md NIP. 19900626 201502 1 003	Pengatur Muda III/a	Verifikator Keuangan	DIII
14	WAHYUDIANNOR, A.Md NIP. 19791103 200906 2 001	Pengatur II/c	Pengolah Data Pelayanan	SLTA
15	HAMSANI NIP. 19790820 200701 1 010	Pengatur II/c	Pengadministrasi Pemerintahan pada Seksi TataPemerintahan	SLTA
16	AMIR MAHMUD NIP. 19701004 200701 1 031	Pengatur II/c	Pengadministrasi Umum pada Seksi Pelayanan	SLTA
17	WIWIK NUGROHO NIP. 19710202 201406 1 003	Pengatur Muda Tk I II/b	Pengadministrasi keuangan pada Sub BagianPerencanaan dan Keuangan	SLTA
18	LAILI MUZAKIR NIP. 19821003 200501 1 005	Pengatur Muda II/a	Pengadministrasi pada Kasi Kemasyarakatan	SLTA

F. Isu Strategis Perangkat Daerah

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dijumpai antara lain:

1. Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam hal penegakan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat diidentifikasi permasalahan yaitu :

- 1) Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- 2) Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip;

2. Pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan.

Dalam hal pemberdayaan dan penguatan kelompok rentan diidentifikasi permasalahan yaitu:

- 1) Masih rendah lembaga kemasyarakatan yang berprestasi;
- 2) Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 3) Masih rendahnya usulan masyarakat yang masuk di Musrenbang Kabupaten;
- 4) Belum optimalnya Penyusunan APBDES;
- 5) Belum optimalnya desa yang administrasi pengelolaan keuangannya yang baik.

3. Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN.

Dalam hal tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN diidentifikasi permasalahan yaitu:

- 1) Masih kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bumi Makmur;
- 2) Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bumi Makmur masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung, ketersediaan Komputer dan peralatan penunjangnya;
- 3) Masih kurangnya kualitas SDM yang ada masih jauh dari standar ideal aparatur pelayanan publik;
- 4) Masih terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan, sedangkan kebutuhan operasional pelayanan dan kegiatan pembangunan.

Untuk lebih jelasnya mengenai identifikasi permasalahan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.4. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah SKPD Kecamatan Bumi Makmur

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat	Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	Rasio Poskamling dan anggota Linmas yang belum sesuai
		Rendahnya tingkat keaktifan linmas/hansip	
2	Pemberdayaan dan Penguatan Kelompok rentan	Masih rendahnya lembaga kemasyarakatan yang berprestasi	Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan (LPMD, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Posyandu) di desa
		Masih rendahnya tingkat keaktifan lembaga kemasyarakatan di desa	
		Belum optimalnya Penyusunan APBDes	Belum optimalnya laporan keuangan desa yang tepat waktu dan sesuai standar pelaporan
		Belum optimalnya desa yang administrasi pengelolaan keuangannya baik	
3	Tata kelola organisasi dan manajemen profesionalitas ASN	Masih kurangnya jumlah personil di Kecamatan Bumi Makmur	Belum terisinya semua Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu.
		Masih kurangnya sarana dan prasarana kantor kecamatan Bumi Makmur	
		Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan.	Kurangnya Anggaran dan sarana prasarana penunjang operasional kegiatan
		Kompetensi SDM masih perlu dibenahi.	Kurangnya peluang dan kesempatan peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka tantangan isu strategis yang dihadapi dari tugas dan fungsi pelayanan kecamatan sebagai berikut.

- 1) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar;
- 2) Isu Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan akuntabel;

- 3) Penguatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

G. Dukungan Sdm Sarana Prasarana Dan Anggaran

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya yang ada pada Kecamatan Bumi Makmur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai yang Menduduki Jabatan pada Kecamatan Bumi Makmur

No.	Nama Jabatan	Jumlah
1	Camat	1
2	Sekretaris Camat	1
3	Kepala Seksi	5
4	Kepala Sub Bagian	2
5	Staf	9
6	PTT	7

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Bumi Makmur masih sangat memerlukan tambahan pegawai sehingga kondisi beban kerja yang ada pada masing masing Kepala Seksi dan Kepala sub bagian dapat berjalan dengan baik.

2. Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparat Kecamatan Bumi Makmur didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.5 Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Bumi Makmur

No.	Nama Barang	Jumlah Yang Ada	Kondisi		
			B	KB	RB
1	Tanah Bangunan kantor				
2	Mini Bus (penumpang 14 orang ke bawah)	2	1	1	
3	Sepeda Motor	11	9	2	
4	Mesin Ketik Manual standard (14-16 incl)	1	1		
5	Lemari Besi / Metal	7	7		
6	Lemari Kayu	0			
7	Rak Besi	4	4		
8	Rak Kayu	1	1		
9	Filing Cabinet Besi	7	7		

10	Lemari Makan	1	1		
11	Mesin Laminating	1	1		
12	Alat Kantor Lainnya	2	2		
13	Meja kerja Kayu	23	14	9	
14	Meja Rapat	11		6	5
15	Meja Podium	1	1		
16	Kasur / Spring Bed	1	1		
17	Meja Makan Besi	2	2		
18	Kursi Rapat	75	50	25	
19	Kursi Tamu	7	7		
20	Kursi Putar	12	8	4	
21	Kursi Biasa	4	2	2	
22	Kursi Lipat	40	20	20	
23	Sofa	2	2		
24	Meubeleur Lainnya	1	1		
25	Jam Elektronik	2	1		1
26	Alat Pembersih Lainnya	4	4		
27	Lemari Es	1	1		
28	A.C, Split	7	2	5	
29	Kipas Angin	11	5	6	
30	Kompore Gas (Alat Dapur)	2	1		1
31	Treng Air / Tandon Air	1		1	
32	Televisi	1	1		
33	Sound System	1		1	
34	Stabilisator	5	1		4
35	Tiang Bendera	2	2		
36	Tangga Aluminium	1		1	
37	Dispenser				
38	Gordyn/Kray	5	5		
39	Meja Kerja Pejabat Lain-Lain	6	1		5
40	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	1		
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	1		
42	Kursi Kerja Pejabat Lainnya	3	3		
43	Camera Electronic	2	2		
44	Layar Film / Projector	2	1		1
45	Uninterupted Power Supply (ups)	5	2	3	
46	P.C Unit	7	4	3	
47	Laptop	9	7		2
48	Note Book	2	1		1
49	Printer (Peralatan Personal komputer)	15	7		7
50	Scanner (Peralatan Personal komputer)	1	1		
51	Exsternal / Portabel Hardisk	2	2		
52	Peralatan Jaringan lainnya	1	1		
53	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1		
54	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	1		
55	Bangunan Tempat Kerja lain-lain (dst)	1	1		

56	Bangunan Parkir Terbuka Permanen				
57	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1			1
58	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	1	1		
59	Tugu / Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2	2		

3. Anggaran

Kecamatan Bumi Makmur di tahun anggaran 2023 memiliki Pagu Murni **Rp. 4.873.725.756,-** dan Pagu Perubahan **Rp. 4.983.255.766,-** dengan 6 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan, Adapun Rincian Anggaran sebagai berikut :

Tabel 1.6 Rincian Anggaran Pagu Sebelum dan Sesudah Perubahan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.491.114.649,00	3.600.644.659,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.032.963.421,00	3.032.963.421,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.670.921,00	3.031.670.921,00
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.292.500,00	1.292.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.269.228,00	283.547.238,00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.360.698,00	2.360.698,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.300.774,00	79.596.799,00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.489.006,00	3.489.006,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.178.750,00	8.178.750,00
Penyediaan Bahan/Material	0,00	9.981.985,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.940.000,00	179.940.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.352.000,00	215.604.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.580.000,00	44.580.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.772.000,00	171.024.000,00

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.530.000,00	68.530.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.900.000,00	31.900.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.630.000,00	36.630.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.379.344,00	16.379.344,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16.379.344,00	16.379.344,00
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16.379.344,00	16.379.344,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.663.120,00	60.663.120,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.663.120,00	60.663.120,00
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11.535.000,00	11.535.000,00
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.128.120,00	49.128.120,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.923.350,00	6.923.350,00
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.923.350,00	6.923.350,00
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.923.350,00	6.923.350,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.282.147.973,00	1.282.147.973,00

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.282.147.973,00	1.282.147.973,00
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.973.800,00	99.973.800,00
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.128.691.673,00	1.128.691.673,00
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	53.482.500,00	53.482.500,00
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.497.320,00	16.497.320,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.497.320,00	16.497.320,00
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.500.000,00	5.500.000,00
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.997.320,00	10.997.320,00
TOTAL ANGGARAN	4.873.725.756	4.983.255.766

H. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Untuk menunjang perbaikan nilai Sakip perlu dilakukan adanya tindak lanjut terhadap hasil evaluasi Sakip pada tahun 2022. Adapun untuk Kecamatan Bumi Makmur ada beberapa item tindak lanjut yang rincikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.7 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

NO.	Komponen	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	Status / Progres Penyelesaian
1	PERENCANAAN KINERJA	Agar dokumen perencanaan diperbaiki dan di formalkan	Penyusunan Dokumen Perencanaan berupa Renstra dan Renja akan segera diperbaiki dan akan diformalkan sesuai ketentuan	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan Bumi Makmur)	https://drive.google.com/drive/folders/16f-Poh0bKt1KrmV9msimLVfWaBfNC38N?usp=drive_link
2	PERENCANAAN KINERJA	Agar Dokumen perencanaan diselaraskan dan dilakukan evaluasi berjenjang secara berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja.	Penyusunan Dokumen perencanaan akan diselaraskan dan dilakukan evaluasi berjenjang secara berkala sehingga akan dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja.	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan Bumi Makmur)	https://drive.google.com/file/d/1VW-VL_Q6xMLCgoQozpaMYCyJ2a3EAof6/view?usp=sharing
3	PERENCANAAN KINERJA	Agar dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja, dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	Akan dilakukan monitoring secara berkala atas hasil pencapaian target kinerja, dan dilakukan berjenjang pada unit kerja dibawahnya sehingga akan diketahui kendala-kendala dalam pencapaian target kinerja dan dibuat sebagai dasar perbaikan kinerja	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan Bumi Makmur)	https://drive.google.com/file/d/1CnkzoLfMIs7-M8SIFHt9Qp1sENum9MDk/view?usp=sharing

4	PENGUKURAN KINERJA	Perlunya pemberian reward dan punishment atas hasil pencapaian kinerja dari perjanjian kinerja yang telah disepakati	Akan dilaksanakan pemberian reward kepada ASN yang berhasil dalam pencapaian target kinerja dan perjanjian kinerja yang telah dilaksanakan	Camat Bumi Makmur	https://drive.google.com/file/d/19sWeXmm7K3PthwwLN6cBEbDkEZ94LK_D/view?usp=sharing
5	PELAPORAN KINERJA	Agar dokumen laporan kinerja diperbaiki dan diformalkan	Akan segera diperbaiki dokumen laporan kinerja sesuai ketentuan dan akan diformalkan	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan Bumi Makmur)	https://drive.google.com/file/d/1VW-VL_Q6xMLCgoQozpaMYCyJ2a3EAof6/view?usp=drive_link
6	PELAPORAN KINERJA	Untuk menjamin keandalan data kinerja, agar ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja	Untuk menjamin keandalan data kinerja, akan segera ditunjuk petugas yang menangani pengumpulan data kinerja	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan Bumi Makmur)	https://drive.google.com/file/d/1CnkzoLfMIs7-M8SIFHt9Qp1sENum9MDk/view?usp=sharing
7	PELAPORAN KINERJA	Agar dibuat tabel dan analisa yang memberikan informasi atas capaian target, sehingga dapat diketahui perhitungan capaian target yang sebenarnya	Akan segera dibuat tabel dan analisa sesuai peruntukannya yang memberikan informasi atas capaian target, sehingga dapat diketahui perhitungan capaian target yang sebenarnya	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	https://drive.google.com/file/d/1CnkzoLfMIs7-M8SIFHt9Qp1sENum9MDk/view?usp=sharing
8	PELAPORAN KINERJA	Agar dibuat data pembandingan tahun-tahun sebelumnya hal ini untuk mengetahui adanya peningkatan / penurunan atas capaian target	Akan segera dibuat data pembandingan tahun-tahun sebelumnya hal ini untuk mengetahui adanya peningkatan / penurunan atas	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan	https://drive.google.com/file/d/1WrYQyLgfmlAvX7tam6PffmjRnRqCANjo/view?usp=sharing

			capaian target kinerja ASN kecamatan Bumi Makmur	Bumi Makmur)	
9	PELAPORAN KINERJA	Agar dibuat informasi terkait Kebijakan Nasional (SPM) yang di ampu, sehingga akan diketahui capaian target yang telah dilakukan	Kecamatan tidak mengampu Kebijakan Nasional (SPM)		
10	PELAPORAN KINERJA	Menginformasikan kendala, solusi dan rencana aksi dalam pencapaian kinerja	Akan segera menginformasikan kendala, solusi dan rencana aksi dalam pencapaian kinerja setiap kinerja ASN	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	https://drive.google.com/file/d/1VW-VL_Q6xMLCgoQozpaMYCyJ2a3EAof6/view?usp=drive_link
11	PELAPORAN KINERJA	Menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran an SDM) dalam mencapai kinerja	Akan segera menginformasikan efisiensi atas penggunaan sumber daya (anggaran an SDM) dalam mencapai kinerja	Seluruh ASN Kecamatan Bumi Makmur	https://drive.google.com/file/d/1VW-VL_Q6xMLCgoQozpaMYCyJ2a3EAof6/view?usp=drive_link
12	PELAPORAN KINERJA	Agar dilakukan reuiu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.	Akan dilakukan reuiu berjenjang atas laporan kinerja yang disusun, sehingga informasi yang disajikan lebih berkualitas, menjadi perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai.	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan Bumi Makmur)	https://drive.google.com/drive/folders/14FIOYE76_7yXr3LJHaXBuFi3XglW3gTk?usp=sharing
13	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Agar dilakukan evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan pengendalian kinerja dibuat rencana aksi, hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja	Akan dibuat evaluasi kinerja internal yang merupakan bentuk pemantauan dan pengendalian kinerja dibuat rencana aksi, hal ini untuk perbaikan dan akan diketahui target-target yang belum	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan Bumi Makmur)	https://drive.google.com/file/d/1CnkzoLfmIs7-M8SIFHt9Qp1sENum9MDk/view?usp=sharing

			tercapai dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja		
14	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	Agar hasil evaluasi AKIP internal ditindaklanjuti dan dimanfaatkan utk perbaikan kinerja dan peningkatran Akuntabilitas Kinerja	Akan segera ditindaklanjuti hasil evaluasi AKIP internal dan dimanfaatkan utk perbaikan kinerja dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Sekretaris dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan (Kecamatan Bumi Makmur)	https://drive.google.com/file/d/11fZdTkNXG8k5xIKKjkQ2qG762rRgcZka/view?usp=sharing

I. Sistematika Penyajian

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2023 sesuai surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 000.8.6.3/3200/ORG tanggal 04 Desember 2023 perihal penyampaian Laporan Kinerja (LKj) SKPD Tahun 2023

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Hukum
- D. Cascading Kinerja
- E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi
- F. Isu Strategis Perangkat Daerah
- G. Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran
- H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun Sebelumnya
- I. Sistematika Penyajian

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi RPJMD
- B. Misi RPJMD
- C. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi
 1. Sasaran RPJMD
 2. Eselon III
 3. Eselon IV

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023
2. Anggaran dan Realisasi Menurut Sasaran dan Program
3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

BAB IV PENUTUP

1. Simpulan
- B. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. IKU
2. Pernyataan Hasil Reviu
3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
4. *Cascading* / Pohon Kinerja
5. Capaian Per Triwulan (1 - 4)
6. Monev Renstra
7. Matrik Keselarasan

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. VISI RPJMD

Rencana Strategis Kabupaten Tanah Laut dijabarkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019.

RPJMD Kabupaten Tanah Laut ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD untuk tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target selama periode tersebut.

Visi adalah suatu gambaran jauh kedepan, kemana suatu organisasi/lembaga hendak dibawa. Pernyataan Visi Kabupaten Tanah Laut sebagaimana tercantum dalam RPJMD 2018-2023 adalah :

**“TANAH LAUT BERKARYA, INOVASI, TERTATA,
RELIGIUS, AKTUAL, DAN SINERGI
(BERINTERAKSI)”**

Kata “BERINTERAKSI” pada Visi di atas merupakan singkatan dari frasa: “Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi”. Penjabaran makna dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

BERKARYA

Maknanya adalah bahwa selama periode 2018-2023, para pelaku pembangunan di Daerah Kabupaten Tanah Laut, secara bersama-sama, berkarya mewujudkan tujuan dasar dari pembangunan daerah, yaitu peningkatan taraf kesejahteraan rakyat.

INOVASI

Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang dilaksanakan seluruh perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, harus semakin ditingkatkan dalam rangka percepatan peningkatan taraf kesejahteraan rakyat. Inovasi ini berupa terobosan jenis pelayanan yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, inovasi di tingkat kelompok-kelompok masyarakat, khususnya di industri kreatif, juga harus dikembangkan sehingga lebih mampu mandiri dalam upaya peningkatan taraf kesejahteraannya.

TERTATA

Aspek administrasi dan aspek substansi diatur secara tertib dalam sebuah siklus atau proses perencanaan yang semakin berkualitas. Dengan demikian, kualitas perencanaan di perangkat daerah, terutama yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja harus semakin ditingkatkan secara berkesinambungan.

RELIGIUS

Peran sektor keagamaan harus semakin ditingkatkan untuk peningkatan produktivitas aparatur dan masyarakat. Aparatur sipil di tiap perangkat daerah harus menjadi teladan dan menginspirasi upaya peningkatan produktivitas pada semua lini kehidupan kemasyarakatan

AKTUAL

Penekanan pada aspek aktual ini adalah bahwa pilihan kebijakan serta program dan kegiatan dari perangkat daerah harus relevan secara waktu, relevan secara lokasi, dan relevan dengan pihak yang dilayani, yaitu masyarakat di Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SINERGI

Sinergi dimaksudkan untuk penguatan prinsip kegotong-royongan dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Ego sektoral dan ego bidang harus dihapus dan digantikan dengan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah.

Tagline dari Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah "**DESA DIBINA, KOTA DITATA**". Sedangkan motto dalam pencapaiannya adalah "**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**".

Dengan demikian, fokus dari keseluruhan Visi Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah Tanah Laut yang *BERINTERAKSI* pada lokus "**DESADIBINA, KOTA DITATA**" melalui "**KERJA KERAS, CERDAS, TUNTAS, BERKUALITAS, DAN IKHLAS**". Fokus pada lokus "**DESA DIBINA, KOTA DITATA**" adalah karena pada hakikatnya masyarakat berdomisili di wilayah perdesaan dan perkotaan.

Kondisi yang diharapkan dari pembinaan desa dan penataan kota di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah karya nyata dalam wujud peningkatan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan di tingkat perdesaan dan perkotaan.

B. MISI

Memperhatikan perubahan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang dan dalam rangka mewujudkan “**Tanah Laut yang BERINTERAKSI**”, maka misi pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut pada periode 2018–2023 adalah sebagai berikut: BERKARYA : Diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut INOVASI: Diwujudkan dengan menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif TERTATA : Diwujudkan dengan membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) RELIGIUS : diwujudkan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat AKTUAL dan SINERGI : diwujudkan dengan membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

C. TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, Kecamatan Bumi Makmur beserta seluruh komponen organisasi berusaha untuk mewujudkan dengan menetapkan tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanah Laut 2018-2023.

Adapun tujuan yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Terwujudnya Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik
3. Terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif dan efisien

Agar pelayanan dan pembinaan masyarakat dapat terselenggara dengan baik dan berhasil guna, maka sasaran yang akan dicapai oleh Kecamatan Bumi Makmur adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
2. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
3. Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian
4. Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD

Sasaran strategis yang telah dirumuskan Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut sebagaimana sasaran Renstra adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1 Sasaran strategis, indikator dan target Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90.20
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60	-
		Nilai SAKIP	85	-
3.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi dan Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Tertib sesuai SOP	100%	100%
4.	Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Pelaporan Keuangan SKPD	Persentase Pengelolaan Perencanaan Pelaporan Keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2019 – 2023 (target 5 tahun) pada renstra disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Kecamatan BumiMakmur
Tahun 2019-2023

No	Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	Indikator	Target				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat	IKM	Sangat Memuaskan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	87	90	92	93	95
2	Terwujudnya Implementasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks RB	60	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	-	45	50	55	60
					Nilai SAKIP	74,00	77	81	84	85
3	Terwujudnya Tata Kelola Administrasi yang Tertib, Efektif dan Efisien	Persentase Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian, Perencanaan Keuangan yang Tertib	100%	Meningkatnya Administrasi Umum dan Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Administrasi Umum dan Kepegawaian yang Tertib sesuai SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			100%	Meningkatnya Tata Kelola Perencanaan Pelaporan Keuangan SKPD	Persentase Pengelolaan Perencanaan Pelaporan Keuangan yang Tertib dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

D. PERJANJIAN KINERJA 2023

Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal makaditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bumi Makmur disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tabel. 2.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggung-Jawab
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil survey	Semua kasi dikecamatan

Perjanjian kinerja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.4, 2.5 dan 2.6 berikut ini :

1. Perjanjian Kinerja Eselon III (Camat Bumi Makmur)

Tabel. 2.4. Perjanjian Kinerja Camat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis kinerja camat yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sebesar 95%

2. Perjanjian Kinerja Eselon III (Sekretaris Camat Bumi Makmur)

Tabel. 2.5. Perjanjian Kinerja Sekretaris Camat

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60
		Nilai SAKIP	85
2	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi dan Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%
3	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%

Dari Tabel diatas dapat diketahui bahwa sasaran strategis kinerja Sekretaris Camat yaitu Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi sebesar 60 dan Akuntabilitas Kinerja sebesar 89 serta meningkatkan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dan Meningkatkan tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD sebesar 100%

3. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Camat, Eselon III dan Eselon IV Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

Tabel. 2.6. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	TOTAL ANGGARAN
Camat :				
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	6 Program / 9 Kegiatan / 21 Sub Kegiatan	Rp. 4.983.255.766,-
Kasi Tata Pemerintahan :				
Fasilitasi administrasi pengelolaan pemerintahan desa	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	11 Desa	2 Program/ 2 Kegiatan/ 2 Sub Kegiatan	

Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	11 Desa		
Monitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data Kependudukannya terverifikasi dengan akurat	11 Desa		
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian bheneka tungga ika serta Mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelatihan Pasukan Paskibraka	1 Kali		
Kasi PMD :				
Memfasilitasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produknya	11 Kelompok	2 Program/ 2 Kegiatan/ 3 Sub Kegiatan	
Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi Kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil dengan baik	11 Desa		
Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	11 Desa		
Fasilitasi kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan/Musdes/Musdesus	2 Kali		
Kasi Kemasyarakatan :				
Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dibidang kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang sosial (Karang Taruna, LAD lembaga Adat Desa)	5 Organisasi	1 Program/ 1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	
Fasilitasi kegiatan di bidang Sosial,keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	14 Keg		

Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuan sosialnya	225 KK		
Kasi Ketentraman dan ketertiban :				
Memfasilitasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	4 Kali	1 Program/ 1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	
Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan dan ketertiban	Jumlah kelompok organisasi masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	11 Kelp		
Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring	12 Kali		
Kasi Pelayanan :				
Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	16 Pelayanan	2 Program/ 2 Kegiatan/ 2 Sub Kegiatan	
Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	2 Aduan		
Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	Jumlah Data informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	4 Dokumen		
Sekcam :				
Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60	1 Program/ 4 Kegiatan / 11 Sub Kegiatan	
	Nilai SAKIP	89		
Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%		
Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%		
Kasubbag Umum dan Kepegawaian :				
Memberikan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik	20 orang	1 Program/ 3 Kegiatan/ 10 Sub Kegiatan	
Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	323 Unit		
Memberikan pelayanan	Jumlah ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan	20 Dok		

administrasi kepegawaian	benar sesuai dengan perundang-Undangan yang berlaku			
Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	1 Program/ 1 Kegiatan/ 1 Sub Kegiatan	
Menyusun laporan kinerja yang disusun sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen		

E. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan dalam Renstra dilakukan melalui pengukuran capaian sasaran strategis dalam hal ini pengukuran indikator kinerja utama. Untuk menguatkan target sasaran strategis pada Tahun 2023, disusun perjanjian kinerja sebagai dokumen pernyataan kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu. Dokumen penetapan kinerja memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Target kinerja menunjukkan komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi untuk mencapai hasil yang diinginkan dari setiap sasaran strategis sesuai indikator kinerja utama yang bersifat *outcome*. Adapun untuk mendukung pelaksanaan kinerja diperlukan instrumen pendukung capaian kinerja berupa anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun Anggaran 2023 mencakup 6 Program, 9 Kegiatan dan 21 Sub Kegiatan (sesudah APBD Perubahan 2023), sedangkan pada APBD Murni 2023 mencakup 6 program dan 9 kegiatan dan 20 Sub Kegiatan. Rincian dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Tabel. 2.7. Program dan Kegiatan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.600.644.659
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.032.963.421

2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	283.547.238
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.604.000
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.530.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		16.379.344
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16.379.344
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		6.923.350
1	Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	6.923.350
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		1.282.147.973
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasaan Kepala Daerah	1.282.147.973
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		60.663.120
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	60.663.120
TOTAL		4.983.255.766

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

1. Sasaran RPJMD

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara/Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran dan hasil (*outcome*) yang dicapai dalam tahun 2023 Kabupaten Tanah Laut.

Laporan Kinerja tahun 2023 ini merupakan laporan kinerja kelima RPJMD 2018-2023 dan menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja. Penetapan indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, baik indikator kinerja hasil dari indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja maupun kinerja tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi tujuh kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Kategori Predikat

Urutan	Predikat	Interprestasi
I.	AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
II.	A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
III.	BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik
IV.	B (Nilai > 80 - 70)	Baik
V.	CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup
VI.	C (Nilai > 30 – 50)	Kurang
VII.	D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 terhadap target sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

NO.	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90.20	100.22%

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bumi Makmur terdiri dari 1 (satu) indikator, yaitu tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 535 lembar kuisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi /Kemampuan Pelaksana Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Sarana dan Prasarana Pelayanan; dan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) didapat nilai untuk IKM Tahun 2023 adalah 90.20 dari target 90, dengan nilai capaian sebesar 100.22% berdasarkan Tabel 3.2. tentang Pengelompokan Capaian Kinerja, IKM Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 termasuk kategori **Sangat Memuaskan**. Adapun nilai rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan yakni :

Tabel 3.3. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 9Unsur Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

No.	Unsur Pelayanan	NRR	IKM Per unsur
1.	Persyaratan	3,62	9.95
2.	Prosedur	3,59	9.87
3.	Waktu Penyelesaian	3,55	9.77
4.	Biaya / Tarif	4,00	11.00
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,65	10.03
6.	Kompetensi Pelayanan	3,57	9.82
7.	Perilaku Pelaksana	3,54	9.73
8.	Sarana dan prasarana	3,45	9.50
9.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,83	10.53

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (4,00) sedangkan unsur dengan Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur Sarana dan prasarana (3,45). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif, sedangkan pada Sarana dan prasarana memberikan tingkat kepuasan paling rendah.

Pada Tahun 2023 Kecamatan Bumi Makmur menetapkan target nilai IKM sebesar 90, sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2023 diperoleh realisasi nilai IKM 90.20 (Mutu Pelayanan Sangat Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan.

Kendala yang dihadapi Kecamatan Bumi Makmur dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah yakni unsur Sarana dan prasarana. Berdasarkan analisa hal ini terjadi karena fasilitas sarana dan prasarana terkait teknologi masih kurang berfungsi maksimal, terutama pada layanan kependudukan.

Adapun solusi yang di ambil untuk mengatasi permasalahan ini menambah

jaringan internet dan perlunya peningkatan koordinasi antara kecamatan dan desa. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat Kecamatan Bumi Makmur dengan mencetuskan inovasi pada Pelayanan Surat menyurat di Kecamatan terutama untuk layanan surat pengantar.

Pada Tahun 2023 (Tahun Ke-5) pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tanah Laut 2018-2023, Kecamatan Bumi Makmur menetapkan 1 (satu) tujuan yang ingin dicapai. Tujuan pertama meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan dengan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yaitu ***Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan.***

Aktual bagi ketentuan yang telah disepakati pihak terkait dan telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur Pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan memadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya dituangkan dalam bentuk kebijakan, dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kinerja Pemerintah Kecamatan efektif, efisien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan.
2. Kebijakan mengembangkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, berakhlak, professional dan daya saing.

Kebijakan mengembangkan perekonomian desa yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi di pedesaan.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan sesuai dengan Visi *“Terwujudnya Tanah Laut yang Berinteraksi, Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi”* dan Misi *“Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan masyarakat berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya”* dituangkan dalam tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Kecamatan Bumi Makmur

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta Pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait. Memperkuat pemahaman aparat akan tugas pokok dan fungsi. Memberdayakan aparat kecamatan kecamatan Desa/Kelurahan. Menyederhanakan dan mempercepat sistem pelayanan kepada masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi yang intensif. Mengikut sertakan aparatur dalam diklat- diklat. Memberikan pemahaman kepada aparat desa mengenai tupoksinya baik melalui arahan ataupun diklat formal/non formal. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat dalam meningkatkan pelayanan yang baik.
Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bumi makmur yang akuntabel.	Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bumi Makmur yang akuntabel.	Meningkatkan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.	Melaksanakan program dan kegiatan tata kelola administrasi perkantoran.

Sasaran Strategis Sesuai Renstra dan Target

Tabel 3.5. Sasaran Strategis Sesuai Renstra dan Target tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	90.20
2.	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokasi dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai RB	60	-
		Nilai SAKIP	85	-
3.	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi dan Kepegawaian	Persentase pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib sesuai SOP	100%	100%
	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Persentase pengelolaan perencanaan pelaporan keuangan yang tertib dan tepat waktu	100%	100%

2. Uraian Capaian Sasaran Sesuai Misi

Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Masyarakat

Pada tahun 2023 SKPD Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut secara keseluruhan telah menetapkan indikator kinerja tersebut, walaupun untuk indikator kinerja outcomenya belum maksimal dapat diukur tingkat capaiannya. Berikut ini data realisasi pelayanan publik kepada masyarakat yang telah dilaksanakan oleh SKPD Kecamatan Bumi Makmur selama kurun waktu 15 tahun.

Tabel 3.6. Realisasi Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	515
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	416
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	174
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	60
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	214
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	43
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	191
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	5
9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	28
10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	14
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	-
12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	17
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)	47
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	3
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	24
16	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-

Sasaran 2 : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik di SKPD

Untuk mengukur Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis terhadap target dan realisasi pada Tahun 2023. Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan, dan keuangan.

Sasaran 3 : Meningkatnya tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Bumi Makmur yang akuntabel

Untuk mengukur Sasaran Strategis ini didukung oleh 1 (satu) indikator dalam rangka pencapaian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang tertib dan Persentase pengelolaan Perencanaan dan Keuangan yang tertib pada Tahun 2023. Sasaran ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan yang berhubungan dengan administrasi umum, pengelolaan kepegawaian, pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran, perencanaan, dan keuangan.

3. Realisasi Capaian Sasaran Strategis

Sasaran 1 : Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Pencapaian Sasaran Strategis terhadap terhadap target dan realisasi pada Tahun 2023 di Kecamatan Bumi Makmur ini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- Administrasi keuangan Perangkat Daerah dengan pagu Rp.3.032.963.421,- terealisasi Rp. 2.431.260.089,- (80,16 %)
- Belanja Barang dan jasa. Rp. 903.677.290,- terealisasi Rp.809.051.165,- (89,53%)

b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan dengan Pagu Rp. 16.379.344,- terealisasi Rp. 11.,836.500,- (72,26 %)

c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

- Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Pagu Rp. 60.663.120,-

teralisasi Rp. 48.096.360,- (79,28%)

d. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dengan Pagu Rp. 6.923.350,- teralisasi Rp. 6.760.000,- (97,64 %).

e. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan Pagu Rp. 1.282.147.973,- teralisasi Rp. 1.265.285.490,- (98,68%)

f. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Pagu Rp. 16.497.320,- teralisasi Rp. 5.000.000,- (30,31%)

Sasaran 2 : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang Baik di SKPD

Untuk mengukur Sasaran Strategis ini didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja dan pencapaian Sasaran Strategis terhadap terhadap target dan realisasi pada Tahun 2023 di Kecamatan Bumi Makmur, yang mana dapat diuraikan sebagai berikut :

Indikator 1 : Persentase terkelolanya adminitrasi perkantoran dan Kepegawaian.

1. Kegiatan yang mendukung pelayanan administrasi perkantoran yang meliputi tata kelola kesekretariatan, perkantoran, perencanaan kebutuhan, pencatatan, pemeliharaan sarana dan prasarana, pelayanan tamu, rapat- rapat dan lain-lain terkait dengan tugas pokok dan fungsi.
2. Tata kelola administrasi kepegawaian yang meliputi penyusunan daftar urut kepangkatan (DUK), kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, terkait tugas pokok dan fungsi.
3. Kegiatan yang berkaitan dengan Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dan gedung kantor berupa rehab pintu dan dinding pembatas ruangan, printer, serta komputer.
4. Kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan disiplin aparatur dalam hal berpakaian rapi saat pelaksanaan tugas-tugas dan dalam hal

mentaati jam kerja masuk kantor dengan melakukan pamarafan absen baik absen masuk dan pulang kantor maupun pembinaan kepegawaian.

Indikator 2 : Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan.

1. Kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan pelaksanaan pertanggung jawaban keuangan sampai dengan pembuatan laporan baik keuangan dan laporan kinerja yang telah diterbitkan yaitu : Revisi terhadap Indikator Sasaran Renstra 2019-2023, Renja 2022 beserta Perubahannya, DPA SKPD 2023 dan DPPA SKPD 2023, Laporan Keuangan Bulanan dan Triwulan, Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023, Laporan LKJ Tahun 2023, dan LKPJ-LPPD Tahun 2023. sehingga jumlah dokumen laporan telah terealisasi 100%. Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis ini telah dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan, yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Pagu sesudah perubahan Rp. 283.547.236,- terealisasi Rp. 253.096.498,- (89,26 %)
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Pagu sesudah perubahan Rp. 215.604.000,- terealisasi Rp. 206.689.866,- (95,86 %)

4. Analisa Capaian Sasaran Strategis

Dari penjelasan pencapaian Sasaran Strategis diatas maka dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian sasaran strategis SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2019 ini sudah hampir tercapai dilihat dari persentase capaian di setiap Indikator sasaran. Adapun Program dan kegiatan yang ada di SKPD Kecamatan Bumi Makmur sifatnya mendukung tujuan yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama Kecamatan yaitu Tercapainya persentase kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan sesuai dengan Visi Kecamatan yaitu ***“Menuju pelayanan BerInTeRAkSi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius Aktual dan Sinergi)“***

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya target sasaran antara lain :

1. Adanya keaktifan dari Aparat Pemerintah Kecamatan atau Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian dalam menjalankan Program dan Kegiatan yang sudah ditetapkan dalam DPA SKPD Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2022.
2. Keaktifan Aparat Pemerintah Desa dalam menindaklanjuti program dan

Kegiatan yang ada di Kecamatan, yang memerlukan peran aktif dari Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

3. Ketersediaan dana yang diberikan Pemerintah Daerah untuk menunjang program dan kegiatan Kecamatan untuk mencapai tujuan, walaupun masih belum optimal.

SKPD Kecamatan Bumi Makmur dalam usaha pencapaian target yang telah ditetapkan menghadapi beberapa permasalahan antara lain masih terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur kecamatan dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah. Adapun solusi yang dapat ditempuh Diantaranya dengan meningkatkan SDM aparatur baik secara kualitas maupun kuantitas, pengisian pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt.) sembari menunggu dilantiknya pejabat definitif, meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat mendukung operasional pelaksanaan tugas serta perlu ditingkatkannya koordinasi dengan pihak-pihak terkait sehingga dapat memperlancar pelaksanaan tugas.

5. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sumber daya memainkan peranan penting dalam pencapaian sasaran strategis dan kinerja organisasi. Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya sarana prasarana. Secara organisasi, dilihat dari sumber daya manusia, Kecamatan Bumi Makmur masih belum ideal. Sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut dengan adanya penyediaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi walaupun tidak bisa maksimal karena kewenangan tugas pokok dan fungsi PTT terbatas. Selain itu juga, Camat meminta peningkatan disiplin dan kinerja dari para Aparatur Sipil Negara pada Kecamatan Bumi Makmur sehingga dapat menuntaskan tujuan dan sasaran organisasi.

Dilihat dari sumber daya keuangan, pada dasarnya berapa pun dana yang diterima akan dikelola secara efektif dan efisien, artinya dalam penggunaan anggaran memenuhi azas sesuai kebutuhan/keperluan riil dan harga yang berlaku di pasaran. Terlihat dari beberapa pekerjaan secara fisik terlaksana 100% akan tetapi anggarannya terserap sekitar 86% hingga 90% artinya dana yang tersisa kembali ke kas daerah dan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) bagi

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam melakukan pembiayaan anggaran pada tahun selanjutnya. Secara integritas dan komitmen, seluruh PPTK telah ditegaskan untuk menggunakan anggaran sesuai kebutuhan riil. Menurut sumber daya sarana dan prasarana, memang saat ini beberapa kebutuhan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah tersedia atau terlaksana. Akan tetapi ada beberapa unit sarana dan prasaranayang sudah tidak layak dan ada juga yang masih belum terpenuhi. Hal ini mengingat prioritas penggunaan anggaran yang menjadi tolak ukur sehingga ada beberapa pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang harus segera dipenuhi, sedangkan yang belum bisa terpenuhi menunggu peluang untuk direalisasikan. Hal yang bisa dilakukan saat ini adalah masing-masing PNS diminta oleh Camat untuk melakukan inovasi sembari menunggu terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana secara bertahap.

6. Eselon IV (Kepala Sub Bagian / Seksi)

Kecamatan Bumi Makmur sampai saat ini sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung sumber pembiayaan APBD Kabupaten Tanah Laut tahun 2023 yang terdiri atas Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian/seksi-seksi yang ada pada lingkup Kecamatan Bumi Makmur. Ada 6 (enam) Program dan 9 (Sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala Seksi dan subbagian lingkup kecamatan Bumi Makmur adalah sebagai berikut :

a. Kepala Seksi Tata Pemerintahan

Tabel 3.7 Tabel Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Realisasi 2022
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Fasilitasi admnistrasi pengelolaan pemerintahan desa	Jumlah desa yang mengelola admnistrasi pemerintahan dengan baik	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa

2	Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilu pilkada, dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjaringan aparat desa dan BPD	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa
3	Monitoring penyusunan laporan kependudukan	Jumlah desa yang data Kependudukannya terverifikasi dengan akurat	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa
4	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestraian bheneka tungga ika serta Mempertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pelatihan Pasukan Paskibraka	1 Kali	1 Kali	100%	1 Kali
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2023					100%	

Pelaksanaan sasaran strategis pada indikator kinerja 1 sampai dengan 4 tahun 2023 pada indikator tersebut diatas dari target masing-masing dari target 11 desa dapat terealisasi 100%. Sedangkan untuk sasaran strategis pada 4 indikator diatas dari target satu kali dan realisasi dapat dicapai satu kali pula dengan capaian pelaksanaan 100%, artinya kegiatan dari beberapa indikator tersebut dapat terpenuhi palaksanaan sesuai dengan rencana kerja.

Pelaksanaan kegiatan dari sasaran strategis 1 sampai dengan 4 tahun 2023 dalam pelaksanaan implementasinya pada indikator tersebut diatas tahun 2023 tidak ada perbedaan pada pencapaian target dan realisasi dengan capaian persentase yang sama.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pada posisi staf bukan menjadi tantantangan, juga terkait anggaran kegiatan dan sarana prasarana yang sangat minim namun dengan keterbatasan tersebut kegiatan diatas dapat dilaksanakan sesuai kemampuan dalam mewujudkan kinerja pada seksi

pemerintahan.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Bumi Makmur dapat mewujudkan realisasi 100% Dalam memfasilitasi administrasi pemerintahan desa dan BPD di koordinasikan dan dilakukan kerjasama dengan instansi terkait. Kegiatan Kasi Pemerintahan Desa Kecamatan Bumi Makmur meliputi penyusunan perundangan undangan di desa dan pembinaan administrasi desa dan tugas pokok desa

Pelaksanaan fasilitasi kepemimpinan yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan yaitu kegiatan dalam acara HUT RI ke 77 di halaman Kantor Kecamatan Bumi Makmur.

Kegiatan-kegiatan Kasi Pemerintahan Tahun 2023 dalam pencapaian target indikator antara lain sebagai berikut :

1. Memfasilitasi Penjaringan dan penyaringan serta mutasi perangkat desa sebanyak 11 desa.
2. Kegiatan pembuatan laporan informasi kependudukan yang di dukung dari data untuk 11 (sebelas) desa dapat dengan lancar pelaksanaannya. Untuk laporan informasi kependudukan, desa melaporkan setiap bulan kepada Kecamatan sehingga informasi kependudukan setiap bulannya diperbaharui.
3. Monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2023 pada 2 (dua) desa yaitu desa Birayang Bawah dan Desa Bumi Harapan
4. Pelaksanaan fasilitasi kepemimpinan yang dilakukan oleh Kasi Pemerintahan yaitu kegiatan dalam acara HUT RI ke 77 di halaman Kantor Kecamatan Bumi Makmur.

Fasilitasi pembinaan dan penyusunan informasi kependudukan juga terlaksana pada 11 (sebelas) desa berupa terwujudnya laporan informasi kependudukan tahun 2023 salah satunya berupa data jumlah penduduk se kecamatan Bumi Makmur baik yang lain yang pindah yang masuk ke wilayah Bumi makmur dan yang meninggal.



Gambar 1 Monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2023 pada 2 (dua) desa yaitu desa Birayang Bawah dan Desa Bumi Harapan



Gambar 2 Monitoring pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2023 pada 2 (dua) desa yaitu desa Birayang Bawah dan Desa Bumi Harapan

Pada bulan Agustus tahun 2023 juga di peringati HUT Kemerdekaan RI ke 77 juga dilaksanakan dengan melibatkan instansi se kecamatan Bumi Makmur dan kepala desa di halaman Kantor Kecamatan Bumi Makmur pada foto dibawah ini .





Gambar 3 Pelaksanaan Pengukuhan Paskibraka dan Pelaksanaan Upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945

1) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Tata pemerintahan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Tapem (Pejabat Pengawas) dan 1 orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan dibawah kendali seksi pemerintahan dengan melakukan tingkat koordinasi dengan Forkompincam, instansi vertikal lainnya yang mengikutsertakan Kecamatan Bumi Makmur dalam setiap event kegiatan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Kasi Tapem yaitu merekapitulasi data jumlah penduduk, fasilitasi pemilihan kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), fasilitasi pemilihan umum legislatif, Pemilihan Presiden, Pemeliharaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten, serta penyusunan LPPD Desa.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pemulihan ekonomi yang melanda Indonesia pada Tahun 2023 masih belum merata dikarenakan adanya masa pemulihan ekonomi terhadap pandemi covid-19 yang lalu tentu akan sangat berdampak pada kondisi keuangan daerah, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proyeksi anggaran belanja daerah Kabupaten Tanah Laut khususnya agar lebih efisien,

efektif dan fokus terhadap program dan kegiatan prioritas daerah. Akibat keterbatasan anggaran tersebut, berdasarkan hasil evaluasi dan verifikasi dari proyeksi perhitungan anggaran yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanah Laut pada Kecamatan Bumi Makmur pada Seksi Tata Pemerintahan mempunyai anggaran untuk menunjang kegiatan pada tahun 2023. Namun walaupun anggaran yang minim ini, seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bumi Makmur tetap mampu menjalankan kinerja yang sudah ditetapkan pada perjanjian kinerja yang sudah ditetapkan.

Tabel 3.8 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Pemerintahan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023
1	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.973.800	99.243.000	99,27%
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.500.000	5.000.000	90,91%
TOTAL				105.473.800	104.243.000	98,83%

Tabel 3.9 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasi Pemerintahan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2023	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila , Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1045, Pelestarian Bhinneka Tunngal ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	99,37%	0,63%
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	90,91%	9,09%
TOTAL RATA - RATA				100,00%	98,83%	1,17%

3) Kendala / Permasalahan yang dihadapi pada Tata Pemerintahan

1. Kurangnya kesadaran untuk inovasi dari SDM Aparatur Desa dalam Pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa.
2. Kurangnya data informasi aparaturnya Desa secara lengkap.
3. Kurang memahami aparat desa dalam hal penyampaian laporan data kependudukan.
4. Pemilihan anggota paskibraka untuk para pelajar terpusat pada satu sekolah saja pada hal sekolah lainnya dengan diadakan seleksi masih banyak yang memenuhi syarat

4) Solusi / Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Tata Pemerintahan

1. Melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik.
2. Melakukan pendataan secara lengkap bagi Aparatur Pemerintah Desa.
3. Melakukan fasiltasi pembinaan secara berkelanjutan oleh BPMD Kabupaten Tanah Laut kepada aparat desa dalam penyusunan laporan kependudukan
4. Pengambilan anggota Paskibraka dari sekolahan tidak hanya terpusat dari satu sekolah.

5) Rencana Aksi yang akan dilakukan pada Seksi Tata Pemerintahan

1. Melakukan pembinaan kepada seluruh Desa tentang Pentingnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dan pentingnya inovasi dalam pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa
2. Melakukan pendataan secara lengkap terhadap aparatur Desa.
3. Melakukan pendampingan kepada aparat desa secara berkala dalam penyusunan laporan kependudukan yang difasiltasi oleh DPMD Kabuparten Tanah Laut dengan melibat admin melalui aplikasi propofil desa dan kelurahan
4. Pemilihan anggota Paskibraka akan dilakukan seleksi dari beberapa sekolahan yang memenuhi pesyaratan dengan ostur badan dan intelektual yang memadai.

b. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 3.9 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2023.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Realisasi 2022
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Memfasiltasi kelompok masyarakat dalam pemasaran hasil produksi	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	11 Kelompok	11 Kelompok	100%	11 Kelompok

2	Memberikan pembinaan tentang penyusunan monografi Kecamatan serta profil desa yang akurat	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa
3	Fasilitasi Pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa
4	Fasilitasi kegiatan Musrenbang tingkat Kecamatan	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan/Musdes/Musdesus	2 kali	0 kali	0%	2 kali
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2023					75%	

Tahun 2023 Fasilitasi Pembinaan, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan dengan tiga jenis Kegiatan yaitu Sosialisasi UKM bagi Pelaku UKM di Desa, Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Bagi Ibu Rumah Tangga (PKK) dalam rangka pemasaran hasil produksi berupa pembuatan telur asin, kerupuk udang dan haruan, peternakan itik, sasirangan yang sampai sekarang masih berjalan.

Sasaran 310 orang dari 11 (sebelas) desa yang mengikuti kegiatan – kegiatan tersebut Kegiatan Sosialisasi UKM bagi pelaku UKM di Desa merupakan upaya dalam Mengembangkan UKM di Desa serta meningkatkan potensi Ekonomi di desa dengan UKM tersebut.

Promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Pembinaan tentang Penyusunan Monografi Kecamatan serta Profil Desa dilaksanakan pada 11 (sebelas) desa. Kegiatan monografi kecamatan dan profil desa di bawah koordinasi Dinas PMD Kabupaten Tanah Laut. Pelaksanaan kegiatan penyusunan monografi kecamatan dan profil desa berjalan dengan baik.



Gambar 4 Fasilitas Hasil Produksi dari UMKM Masyarakat

Penyusunan profil desa terkait kondisi geografis melalui bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat Kecamatan, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam upaya tertib administrasi berupa pembuatan laporan pertanggung jawaban keuangan desa melalui sosialisasi dan bimbingan teknis.



Gambar 4 Fasilitas Penyusunan Profil Desa

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APB Desa untuk 11 (sebelas) desa yang ada di Kecamatan Bumi Makmur dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .



Gambar 5 Fasilitasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa merupakan salah satu Kegiatan dalam Pengelolaan Administrasi dan Perencanaan Keuangan Desa. Yaitu dengan memfasilitasi Evaluasi Rancangan APBDES, sekaligus dalam upaya Pembinaan, Pengawasan dan Penataan administrasi Keuangan Desa. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- 1) Evaluasi Rencana Anggaran (dilaksanakan Bulan Desember sebelum Tahun Anggaran dalam bentuk rancangan APBDES)
- 2) Evaluasi Perubahan Anggaran (dilaksanakan di Bulan April / Juni ditahun anggaran tersebut)
- 3) Pembinaan Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan Setiap Triwulan di Tahun Anggaran tersebut)

Kegiatan pelaksanaan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023 berupa fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa sangat minim teranggarkan mengingat adanya pengurangan anggaran atas kebijakan dengan memaksimalkan anggaran kegiatan yang ada pada Kecamatan Bumi Makmur. Walaupun dengan ketiadaan anggaran kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa namun kegiatan tetap dilaksanakan atas swadaya dan inisiatif

bidang.

Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa yang mencakup kegiatan Musrenbang yang pada tahun 2023 tidak dilaksanakan di Kecamatan Bumi Makmur dikarenakan pelaksanaan dilaksanakan di satu tempat yakni di Kecamatan Kurau dengan peserta dari Kecamatan Bumi Makmur dan Kecamatan Panyipatan.

1) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi PMD di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Kasi PMD (Pejabat Pengawas) dan 1 (satu) orang Analis Data dan Informasi dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan pemberdayaan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi PMD yaitu melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya, melakukan penyusunan profil desa, Pelaksanaan Evaluasi APBDDes, Evaluasi APBDDes perubahan, melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya. melakukan kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan),

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Kegiatan pelaksanaan pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2023 terdiri atas 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) Sub kegiatan, namun dalam pelaksanaan kegiatan adanya Kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah terhadap anggaran maka untuk mengantisipasi tersebut adanya pengurangan anggaran atas kebijakan dengan memaksimalkan anggaran kegiatan yang ada pada Kecamatan Bumi Makmur. Walaupun dengan ketiadaan anggaran kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa namun kegiatan tetap dilaksanakan atas swadaya dan inisiatif bidang.

Tabel 3.10 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11.535.000	8.745.000	75,81%
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.128.120	39.351.360	80,10%
2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.997.320	0	0,00%
TOTAL				71.660.440	48.096.360	67,12%

Tabel 3.11 Tabel Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2023	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	100%	75,81%	24,19%
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100%	80,10%	19,90%

2	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Sub Kegiatan Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	0%	0,00%	0,00%
TOTAL RATA – RATA				66,67%	51,97%	14,70%

3) Kendala / Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Ketersediaan bahan baku dan permodalan yang dimiliki masyarakat dalam memproduksi hasil produk yang akan dipasarkan sesuai komoditas yang desa yang di produk oleh masyarakat desa
2. Penyusunan profil desa belum dilaksanakan secara optimal oleh desa
3. Kurangnya memahami aparat desa dalam pengelolaan keuangan desa terutama dalam sistem adminstrasi berupa pengamprahan keuangan desa dan kelengkapan pelaporan pertanggungjawaban kegiatannya.
4. Kurangnya pemahaman aparat desa dalam hal pemilahan usulan kegiatan yang akan diusulkan atas kegiatan berupa fisik, infrastruktur yang tidak relevan usulan tersebut.
5. Tahun 2023 kegiatan Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dalam hal ini pelaksanaan Musrenbang dilaksanakan secara kumulatif oleh 3 kecamatan di Kecamatan Kurau sehingga serapan kinerja dan keuangan untuk kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan.

4) Solusi atas kendala permasalahan yang dihadapi pada seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Melakukan disversifikasi pengolahan produk lain yang akan dihasilkan oleh masyarakat desa serta melakukan kemitraan dengan kelembagaan keuangan dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa dan per Bank kan lainnya dalam hal mendukung permodalan agar keberadaan produk dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Perlu adanya sosialisasi, motivasi bagi aparat desa dalam hal pembuatan profil desa

3. Perlu adanya pembimbingan aparat desa secara berkelanjutan oleh pihak Kecamatan dan BPMD Kabupaten terutama Sekdes, Bendahara dalam pengelolaan keuangan desa.
4. Sebelum pelaksanaan rekapitulasi usulan kegiatan masyarakat berupa fisik dan infrastruktur lainnya yang dituangkan dalam rencana kerja desa diharapkan aparat desa untuk dapat berkoordinasi dulu dengan satuan kerja perangkat daerah yang akan mengampu usulan kegiatan hasil Musrenbang desa dan Kecamatan.

5) Rencana Aksi yang akan dilaksanakan oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1. Melakukan pembinaan dan peningkatan wawasan kepada pengrajin UKM di desa dalam upaya menjaga kestabilan produk yang dihasilkan secara terus menerus oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini oleh Disnakerin Kabupaten.
2. Fasilitasi pendampingan penyusunan profil desa perlu diupayakan secara berkesinambungan oleh BPMD Kabupaten, mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang ada di desa masih rendah.
3. Perlu adanya fasilitasi bimbingan kepada aparat desa secara berkesinambungan dalam pengelolaan keuangan desa dan sistem pertanggungjawabannya minimal 3 (tiga) kali dalam setahun dan perlunya untuk menganggarkan kegiatan belanja pelatihan terhadap pengelolaan keuangan desa dan inventarisasi asset desa.
4. Perlu upaya untuk dilaksanakan lebih awal oleh aparat desa atas skala prioritas usulan program dan kegiatan desa untuk dapat diverifikasi lebih awal sebelum ditetapkan dalam usulan hasil rencana kerja pembangunan desa sebelum dilaksanakannya forum Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan.

c. Kepala Seksi Kemasyarakatan

Tabel 3.12 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Realisasi 2022
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Memberikan pembinaan kepada kelompok organisasi masyarakat dibidang kemasyarakatan	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang sosial (Karang Taruna, LAD lembaga Adat Desa	5 Organisasi	5 Organisasi	100%	0 Organisasi
2	Fasilitasi kegiatan di bidang Sosial,keagamaan, kebudayaan dan olahraga di tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	14 Keg	14 Keg	100%	2 Keg
3	Fasilitasi penyaluran bantuan sosial di Kecamatan	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasiltasi penyaluran bantuannya	225 KK	210 KK	93,33%	0 KK
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2023					97,78%	

Pada sasaran strategis 1 pada indikator kinerja jumlah kelompok organisasi masyarakat tahun 2023 pelaksanaan kegiatan hibah dengan anggaran 1 Milyar. Sedang sasaran dua pada indikator kinerja jumlah kegiatan dibidang sosial keagamaan, kebudayaan dan olah raga dari target 14 (empat belas) kegiatan dapat terealisasi sebanyak 14 (sebelas) kegiatan kegiatan berupa MTQ dan Safari Ramadhan dengan capaian. Kegiatan buka puasa bersama / Safari Ramadhan Bupati/Wakil Bupati beserta Pejabat Kabupaten dengan masyarakat dan Kegiatan MTQ Tingkat Kecamatan Bumi Makmur pada tahun 2023 terlaksana dengan baik.



Gambar 6 Pelaksanaan Safari Ramadhan



Gambar 7 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan di Kecamatan Kintap



Gambar 8 Fasilitas Kegiatan Bantuan Sosial Kepada Masyarakat



Gambar 9 Pelaksanaan Kegiatan Hibah di Desa

Sedangkan fasilitasi bantuan sosial dari target 225 KK hanya terlaksana 210 KK hal ini disebabkan hasil verifikasi oleh petugas pendataan lapangan yang tidak memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi akhir pendataan ulang, serta para penerima bantuan sosial pindah kedesa lain tanpa adanya pemberitahuan lebih awal, adanya perbedaan nama penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan ejaan penulisan nama / huruf.

1) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi kemasyarakatan.

Dalam menjalankan kegiatan, Seksi Kemasyarakatan di Kecamatan Bumi Makmur dibantu dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Kemasyarakatan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN (jabatan pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kemasyarakatan yaitu melakukan kegiatan fasilitasi kafilah Kec. Makmur mengikuti kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, kegiatan Buka Puasa bersama Bupati Tanah Laut dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta masyarakat pada bulan ramadhan Tahun 1443 H, Sosialisasi Pelaksanaan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam menjalankan kegiatannya, seksi Kemasyarakatan ditunjang dengan 1 (satu) program, 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp.

1.128.691.673,- (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan satu Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah). Capaian realisasi anggaran seksi kemasyarakatan mencapai 99,77 atau dari anggaran Rp. 1.126.094.000,-

Tabel 3.12 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Kemasyarakatan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023
1	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal. Regional dan Nasional	1.128.691.673	1.126.094.000	99,77%
TOTAL				1.128.691.673	1.126.094.000	99,77%

Tabel 3.13 Tabel Efisiensi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2023 Kasi Kemasyarakatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2023	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal. Regional dan Nasional	100%	99,77%	0,23%
TOTAL RATA - RATA				100%	99,77%	0,23%

3) Kendala / Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Kemasyarakatan

1. Belum tertib dan kurang memahaminya organisasi kemasyarakat dalam membuat proposal dan laporan pengajuan dalam hal permohonan kegiatan kemasyarakatan , keagamaan dan bantuan sosial serta pertanggung jawaban

kegiatan yang telah dilaksanakannya.

2. Pihak organisasi yang ada didesanya berharap besar kepada pihak Kecamatan dalam hal ini bagian Kemasyarakatan untuk membuat laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Calon penerima hibah atau organisasi penerima tidak memahami sistem penggunaan dan akhir pembuatan pelaporan dana hibah
4. Tidak adanya koordinasi lebih awal dengan pihak pemberi hibah dengan pihak Kecamatan pada saat penyaluran hibah kepada calon penerima hibah

4) Solusi atas kendala permasalahan yang dihadapi pada Seksi Kemasyarakatan

Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat., organisasi calon penerima hibah terkait tata cara pembuatan proposal dan pelaporan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan.

5) Rencana Aksi Yang akan dilakukan

1. Melakukan penyusunan draft pada tahap pengajuan dan verifikasi proposal yang disampaikan calon penerima hibah.
2. Melakukan penyesuaian standar harga yang dibuat oleh Pemerintah daerah Kabupaten Tanah Laut sehingga diharapkan Rencana Anggaran Biaya memakai standar harga Pemerintah Daerah dengan bimbingan teknis Kasi Kemasyarakatan Kecamatan Bumi Makmur.
3. Sebelum pelaksanaan hibah dilakukan Pihak Kecamatan berkewajiban untuk mengajukan telaahan staf ke Bupati Tanah Laut terkait pengajuan hibah dari Kecamatan.

d. Kepala Seksi Pelayanan

Tabel 3.13 . Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Realisasi 2022
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	16 Pelayanan	16 Pelayanan	100%	16 Pelayanan

2	Memfasilitasi penanganan Aduan Masyarakat	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	2 Aduan	0 Aduan	0	0 Aduan
3	Menyusun Data informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	Jumlah Data informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	0 Dokumen
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2023					100,00%	

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Bumi Makmur, salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sesuai rencana strategis yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018 s/d 2023, dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun 2023 memperoleh IKM sebesar 3,61 (90,20) dengan mutu pelayanan berkategori sangat baik.

Adapun jenis pelayanan pada kantor kecamatan Bumi Makmur yang dilaksanakan selama tahun 2023 sebagai berikut :

A. Pelayanan Non Perizinan

1. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga
2. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP
3. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA
4. Pelayanan fasilitasi pengajuan Surat Keterangan Pindah
5. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran
6. Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa
8. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
9. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
11. Pelayanan Pengajuan Subsidi Listrik PLN
12. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha
13. Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)
14. Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)

B. Pelayanan Perizinan

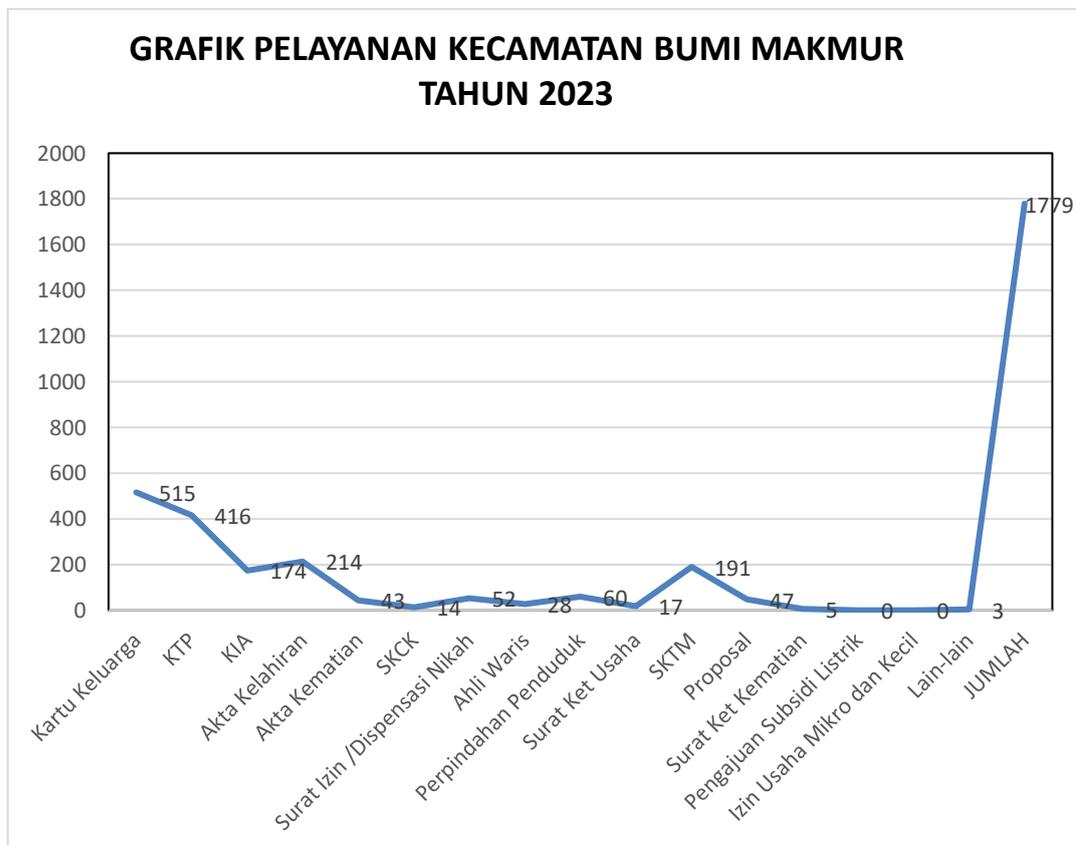
1. Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah
2. Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil

Kecamatan Bumi Makmur telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di kantor Kecamatan Bumi Makmur. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 14 jenis pelayanan non perizinan dan 2 pelayanan perizinan dengan jumlah sebanyak 16 pelayanan yang telah memenuhi target indikator tahun 2023 dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi, pelayanan administrasi kependudukan dan legalisasi surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.14 sebagai berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Kartu Keluarga	515	Seksi Pelayanan
2	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KTP	416	Seksi Kemasyarakatan
3	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan KIA	174	Seksi Tapem
4	Pelayanan fasilitasi pangajuan Surat Keterangan Pindah	60	Seksi Tapem
5	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kelahiran	214	Seksi Tapem
6	Pelayanan fasilitasi pembuatan dan perubahan Akta Kematian	43	Seksi Pelayanan
7	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	191	Seksi Kemasyarakatan
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Kematian dari Desa	5	Seksi Pelayanan
9	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli	28	Seksi Pelayanan

	Waris		
10	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	14	Seksi Kemasyarakatan
11	Pengajuan Subsidi Listrik PLN	-	Seksi Pelayanan
12	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha	17	Seksi Pelayanan
13	Pelayanan Legalisasi Pengajuan Proposal (Masjid, Mushola, Majelis, Kelompok Keagamaan, Yayasan, Pendidikan, Karang Taruna, Kelompok Tani dsb)	47	Seksi Kemasyarakatan
14	Pelayanan Legalisasi Surat-Surat (Keterangan lain-lain)	3	Seksi Pelayanan
15	Pelayanan Surat Rekomendasi Izin Dispensasi Nikah	24	Seksi Kemasyarakatan
16	Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil	-	Kasi PMD



Grafik 1. Grafik Data Pelayanan Tahun 2023

Berdasarkan pada Tabel dan Gambar diatas, Pelayanan Kepengurusan

Kartu Keluarga mempunyai capaian paling banyak yaitu 515 berkas untuk Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil dan Pengaduan Subsidi Listrik tidak ada sama sekali.

Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 535 lembar kuesioner yang telah diisi oleh masyarakat, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2023 adalah 90,20 dan termasuk kategori **Sangat Baik** serta berada dalam mutu pelayanan **A**.

Dan untuk sejak tahun 2017 hingga tahun 2023, Kecamatan Bumi Makmur sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) dengan didukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Seksi dan Sub Bagian yang ada di SKPD Kecamatan Bumi Makmur.

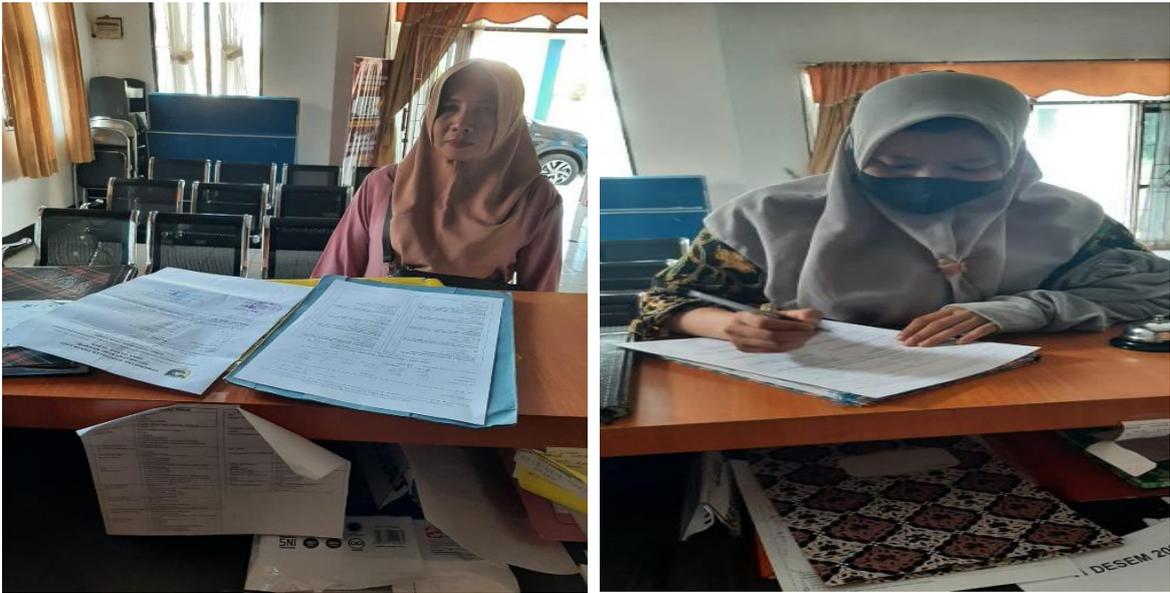
Untuk mengetahui tingkat layanan yang ada di Kecamatan dengan menggunakan 9 indikator yang dipertanyakan dalam mengisi kuisisioner yang diberikan kepada masyarakat yang sedang meminta pelayanan ke Kantor Kecamatan Bumi Makmur 9 indikator meliputi beberapa pertanyaan yang antara lain adalah :

1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya
2. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan diunit ini
3. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan Pelayanan
4. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam Pelayanan
5. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian produk layanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
6. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi kemampuan petugas dalam Pelayanan
7. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan
8. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana
9. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna

layanan

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,20 dari 535 responden yang mengisi kuisioner.

Berikut Dokumentasi Pengisian lembar kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat :



Gambar 10. Dokumentasi Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur

Pada Tahun 2023 Laporan IKM terbagi menjadi per Triwulan atau 4 kali dalam satu tahun, Berikut Hasil Pengolahan Data Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Menjadi Laporan IKM :

Hasil Penilaian Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2023

A. Tabel 3.15 IKM Triwulan I

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Σ Nilai Per Unsur	427	428	428	544	429	428	434	431	519		
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisisioner yg Terisi	3.14	3.15	3.15	4.00	3.15	3.15	3.19	3.17	3.82		
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0,11	0.35	0.35	0.35	0.44	0.35	0.35	0.35	0.35	0.42	3.29	
IKM Per unsur	8.63	8.65	8.65	11.00	8.67	8.65	8.78	8.72	10.49		
IKM Unit Pelayanan										82.26	
- U1 s.d. U 9	= Unsur-Unsur pelayanan									U1	Persyaratan pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata									U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat									U3	Waktu Penyelesaian
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang									U4	Biaya / Tarif pelayanan
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 186									U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuisisioner yang terisi									U6	Kompetensi Pelaksana
NRR tertimbang per unsur	= NRR per unsur x 0,11									U7	Perilaku Pelaksana
										U8	Sarana dan Prasarana
										U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
IKM UNIT PELAYANAN : 82.26											
Mutu Pelayanan :											
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00										
B (Baik)	: 76,61 - 88,30										
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60										
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99										

B. Tabel 3.16 IKM Triwulan II

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Σ Nilai Per Unsur	459	459	457	496	462	458	458	445	486		
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisisioner yg Terisi	3.70	3.70	3.69	4.00	3.73	3.69	3.69	3.59	3.92		
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0,11	0.41	0.41	0.41	0.44	0.41	0.41	0.41	0.39	0.43	3.71	
IKM Per unsur	10.18	10.18	10.14	11.00	10.25	10.16	10.16	9.87	10.78		
IKM Unit Pelayanan										92.70	
- U1 s.d. U 9	= Unsur-Unsur pelayanan									U1	Persyaratan pelayanan
- NRR	= Nilai rata-rata									U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat									U3	Waktu Penyelesaian
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang									U4	Biaya / Tarif pelayanan
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 186									U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuisisioner yang terisi									U6	Kompetensi Pelaksana
NRR tertimbang per unsur	= NRR per unsur x 0,11									U7	Perilaku Pelaksana
										U8	Sarana dan Prasarana
										U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
IKM UNIT PELAYANAN : 92.70											
Mutu Pelayanan :											
A (Sangat Baik)	: 88,31 - 100,00										
B (Baik)	: 76,61 - 88,30										
C (Kurang Baik)	: 65,00 - 76,60										
D (Tidak Baik)	: 25,00 - 64,99										

C. Tabel 3.17 IKM Triwulan III

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unsur	524	519	517	548	522	516	497	480	534	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisisioner yg Terisi	3.82	3.79	3.77	4.00	3.81	3.77	3.63	3.50	3.90	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0,11	0.42	0.42	0.42	0.44	0.42	0.41	0.40	0.39	0.43	3.74
IKM Per unsur	10.52	10.42	10.38	11.00	10.48	10.36	9.98	9.64	10.72	
IKM Unit Pelayanan										93.48
- U1 s.d. U 9	= Unsur-Unsur pelayanan							U1	Persyaratan pelayanan	
- NRR	= Nilai rata-rata							U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan	
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat							U3	Waktu Penyelesaian	
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang							U4	Biaya / Tarif pelayanan	
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 186							U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuisisioner yang terisi							U6	Kompetensi Pelaksana	
NRR tertimbang per unsur	= NRR per unsur x 0,11							U7	Perilaku Pelaksana	
							U8	Sarana dan Prasarana		
							U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan		
IKM UNIT PELAYANAN : 93.48										
Mutu Pelayanan :										
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00										
B (Baik) : 76,61 - 88,30										
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60										
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99										

D. Tabel 3.18 IKM Triwulan IV

No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unsur	525	515	499	552	539	509	503	492	509	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuisisioner yg Terisi	3.80	3.73	3.62	4.00	3.91	3.69	3.64	3.57	3.69	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0,11	0.42	0.41	0.40	0.44	0.43	0.41	0.40	0.39	0.41	3.70
IKM Per unsur	10.46	10.26	9.94	11.00	10.74	10.14	10.02	9.80	10.14	
IKM Unit Pelayanan										92.52
- U1 s.d. U 9	= Unsur-Unsur pelayanan							U1	Persyaratan pelayanan	
- NRR	= Nilai rata-rata							U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan	
- IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat							U3	Waktu Penyelesaian	
- *)	= Jumlah NRR IKM tertimbang							U4	Biaya / Tarif pelayanan	
-**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 186							U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	
NRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuisisioner yang terisi							U6	Kompetensi Pelaksana	
NRR tertimbang per unsur	= NRR per unsur x 0,11							U7	Perilaku Pelaksana	
							U8	Sarana dan Prasarana		
							U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan		
IKM UNIT PELAYANAN : 92.52										
Mutu Pelayanan :										
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00										
B (Baik) : 76,61 - 88,30										
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60										
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99										

E. Tabel 3.19 IKM Tahun 2023

LAPORAN SKM TAHUNAN KECAMATAN BUMI MAKMUR										
No. Responden	Nilai Unsur Pelayanan									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Σ Nilai Per Unsur	1935	1921	1901	2140	1952	1911	1892	1848	2048	
NRR Per Unsur = Jlh Nilai Per Unsur = Jlh Kuesioner yg Terisi	3.62	3.59	3.55	4.00	3.65	3.57	3.54	3.45	3.83	
NRR tertimbang Per unsur = NRR Per Unsur x 0,11	0.40	0.39	0.39	0.44	0.40	0.39	0.39	0.38	0.42	3.61
IKM Per unsur	9.95	9.87	9.77	11.00	10.03	9.82	9.73	9.50	10.53	90.20
IKM Unit Pelayanan										
U1 s.d. U9	= Unsur-Unsur pelayanan								U1	Persyaratan pelayanan
NRR	= Nilai rata-rata								U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur pelayanan
IKM	= Indeks Kepuasan Masyarakat								U3	Waktu Penyelesaian
*)	= Jumlah NRR IKM tertimbang								U4	Biaya / Tarif pelayanan
**)	= Jumlah NRR Tertimbang x 186								U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
IRR Per Unsur	= Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi								U6	Kompetensi Pelaksana
IRR tertimbang per unsur	= NRR per unsur x 0,11								U7	Perilaku Pelaksana
									U8	Sarana dan Prasarana
									U9	Penanganan Pengaduan, saran dan Masukan
IKM UNIT PELAYANAN				:		90.20				
Kategori Pelayanan :										
A (Sangat Baik) : 88,31 - 100,00										
B (Baik) : 76,61 - 88,30										
C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60										
D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99										

Berdasarkan tabel diatas, Hasil capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 adalah 90.20 dengan Jumlah Responden 535 orang berpredikat A (Sangat Baik):

1) Analisis Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pelayanan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang yaitu 1 orang Kasi pelayanan (Pejabat Pengawas) dan dibantu 2 (dua) orang staf PTT dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Seksi Pelayanan mendapatkan anggaran dan seksi pelayanan Kecamatan Bumi Makmur telah mampu melaksanakan tujuan kinerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023.

Tabel 3.20 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Pelayanan Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16.379.344	11.836.500	72,26%
TOTAL				16.379.344	11.836.500	72,26%

Tabel 3.21 Tabel Efisiensi Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Tahun 2023 Kasi Pelayanan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2023	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Program penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100%	72,26%	27,74%
TOTAL RATA - RATA				100%	72,26%	27,74%

Pelaksanaan Realisasi Anggaran dalam rangka meningkatkan pelayanan Kecamatan Bumi Makmur, sebagai berikut :

- a) Rapat Evaluasi Pelayanan dan Peningkatan Sinergitas Pelayanan Kecamatan Dengan Desa-Desa Di Kecamatan Bumi Makmur



Gambar 11. Rapat Evaluasi Pelayanan dan Peningkatan Sinergitas Pelayanan Kecamatan Dengan Desa-Desa Di Kecamatan Bumi Makmur

b) Rapat Perbaiki Pelaporan dan Sinkronisasi Pelayanan



Gambar 12. Rapat Perbaikan Pelaporan dan Sinkronisasi Pelayanan

- c) Pelaksanaan Inovasi Sistem Informasi Cepat terlayani, Aman, Nyaman, Tertib, Inovatif dan Konsisten (SI CANTIK)



Gambar 13. Sosialisasi Aplikasi SI Cantik



Gambar 14 Pelaksanaan Inovasi Si Cantik

3) Kendala / Permasalahan yang di hadapi Seksi Pelayanan

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi dikarenakan fasilitas sarana dan prasarana terkait teknologi masih kurang berfungsi maksimal, terutama pada layanan kependudukan.

Adapun solusi yang di ambil untuk mengatasi permasalahan ini menambah jaringan internet dan perlunya peningkatan koordinasi antara kecamatan dan desa. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat Kecamatan Bumi Makmur dengan mencetuskan inovasi pada Pelayanan Surat menyurat di Kecamatan terutama untuk layanan surat pengantar.

4) Solusi Yang di hadapi oleh Kasi Pelayanan

Untuk lebih meningkatkan produk dan layanan yang maksimal agar Kecamatan Bumi Makmur menjadi lebih baik, antara lain :

1. Pelayanan prima, Kecamatan Bumi Makmur sebagai salah satu SKPD di Pemerintahan Tanah Laut yang menyelenggarakan pelayanan Publik harus mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, gratis, memiliki legalitas hukum dan tentunya

berdasarkan prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintahan, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong perkembangan dinamika aktivitas masyarakat.

2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan aparatur.
3. Optimalisasi Koordinasi dengan Perangkat Desa se Kecamatan Bumi Makmur selaku Pelayanan Pertama sebelum masyarakat ke kecamatan dalam penyelenggaraan pelayanan yang baik dan efisien.
4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang sudah ada, dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara konsisten terutama mempertahankan kejelasan dan kepastian petugas pelayanan serta kenyamanan lingkungan.
5. Untuk fasilitas layanan kependudukan dikoordinasikan optimal bersama dengan Operator SIAK Kecamatan dengan Disdukpencahil.
6. Melaksanakan inovasi Pelayanan melalui website SI CANTIK, mempermudah dalam pengajuan pelayanan surat pengantar yang memerlukan pengesahan dari Kecamatan.

5) Rencana Aksi Yang di Laksanakan oleh Kasi Pelayanan

Untuk mewujudkan solusi dalam mentasi permasalahan yang ada pada Seksi Pelayanan, antara yang lain :

1. Perlunya lebih intensif dalam berkoordinasi antara Kecamatan dengan desa dengan meningkatkan pelayanan masyarakat.
2. Mendiskusikan permasalahan/saran pelayanan melalui rapat evaluasi dan monitoring pelayanan yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun dengan melibatkan kepala desa dan aparat desa.
3. Melaksanakan inovasi perubahan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mempermudah kepengurusan administrasi yaitu surat menyurat, seperti surat pengantar yang memerlukan pengesahan dari Kecamatan.
4. Konsisten melaksanakan inovasi dan melakukan pembaharuan/perbaikan dalam menunjang pelaksanaan inovasi SI CANTIK.

5. Memperkuat Sarana dan Prasarana terutama Jaringan
6. Melaksanakan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan Desa terkait Pelayanan di Desa

e. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 3.22 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Tahun Anggaran 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			Realisasi 2022
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Memfasilitasi Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali
2	Membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan dan ketertiban	Jumlah kelompok organisasi masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	11 Kelp	11 Kelp	100%	11 Kelp
3	Monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali
Rata - rata Capaian Kinerja Tahun 2023					100,00%	

Kegiatan pertemuan koordinasi dan fasilitasi kepada masyarakat yang diikuti sebanyak 40 (empat puluh) orang. Dimana kegiatan tersebut penyampaian tentang regulasi dan teknis peraturan dalam ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Terutama hal aduan tentang penyakit masyarakat / Kejahatan di lingkungan masyarakat dan bahaya narkoba bagi masyarakat , generasi muda.



Gambar 15 Kegiatan Rapat Koordinasi Forkopincam



Gambar 16 Kegiatan Pembinaan Linmas Kecamatan



Kegiatan pertemuan Pembinaan Perlindungan Masyarakat yang diikuti sebanyak 120 (Seratus dua puluh) orang. Dimana kegiatan tersebut penyampaian tentang regulasi dan teknis dalam perlindungan di masyarakat khususnya anggota linmas desa agar lebih berperan aktif dalam memberikan perlindungan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat itu.

Selain kegiatan diatas, Tugas dan fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban adalah memberikan koordinasi dengan anggota Linmas Desa bersama dengan Aparatur Desa sehingga keselarasan anatar kecamatan dan desa bisa berjalan dengan baik. Salah satu indikator keberhasilan di seksi ketentraman dan ketertiban yaitu berkurangnya pengaduan atau kasus kriminal di masyarakat serta berkurangnya penyalahgunaan zat adiktif dan terlarang di masyarakat itu sendiri.

1) Analisis Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi Ketentraman dan Ketertiban dengan dibantu 1 (satu) orang staf dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Trantib yaitu melakukan pembinaan dan fasilitasi penanganan gangguan dan keamanan , serta membina kelompok masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban , sosialisasi dan monitoring penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai dampak adanya kebijakan daerah Kabupaten Tanah terhadap penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah yang menekankan perlunya efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 maka diharapkan satuan kerja perangkat daerah untuk dapat memaksimalkan kegiatan dengan tepat sasaran dan out put yang jelas serta terukur.

Pada posisi lain kegiatan yang harus dilaksanakan pada Seksi Ketentraman dan ketertiban idealnya memerlukan pembiayaan atau belanja kegiatan yang cukup memadai yang harus diakomodir oleh Bappeda Kabupaten Tanah Laut, mengingat kegiatan ini sangat perlu untuk diberikan dukungan pagu anggaran pada kegiatan Trantib dalam upaya arah menciptakan kondisi lingkungan yang aman, kondusif dan terkendali, dari bahaya bencana, penyebaran narkoba, bencana alam dan lain-lain. Namun dengan keterbatasan anggaran ini pada Seksi Trantib Kecamatan Bumi Makmur tetap mampu melaksanakan tujuan kinerja yang sudah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023.

Tabel 3.23 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	6.923.350	6.760.000	97,64%
2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	53.482.500	39.948.490	74,69%
TOTAL				60.405.850	46.708.490	77,32%

Tabel 3.24 Tabel Efisiensi Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasi Ketentraman dan Ketertiban Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2023	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	100,00%	97,64%	2,36%
TOTAL EFISIENSI				100,00%	97,64%	2,36%

3) Kendala / Permasalahan yang di hadapi Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Pada saat pelaksanaan penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan dihadapkan pada pola pikir dan karekteristik yang berbeda dengan tingkat Pendidikan yang berbeda pulla sehingga dibutuhkan waktu untuk kesabaran dalam rangka pembinaan masyarkat.
2. Pada saat penjarangan anggota kelompok masyarakat sebagai anggota Linmas lebih kecenderungan yang berpartisipasi para kaum tua sedang kaum muda tidak punya keinginan untuk menjadi anggota perlindungan masyarakat.
3. Letak wilayah posisi Kecamatan Bumi Makmut Berada dipaling ujung Kabupaten Tanah laut yang berbatasan langsung wilayah dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar, sehingga diperlulan pengawasan dan monitoring pada posisi yang strategis sangat rawan terjadi gangguan ketentraman dan ketertiban berupa adanya penyebaran narkoba, tindak pidana kejahatan dan lain-lain.

4) Solusi Yang di hadapi oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kelompok bersama dengan pihak TNI, Polri, Kesbangpol dan Satpol Pamong Praja dan Kementerian agama serta UPTD Puskemas setempat tentang pentingnya mengutamakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan kenakalan remaja dan bahaya narkoba kepada usia remaja khususnya.
2. Memotivasi kelompok masyarakat dan kaum muda secara terus menerus yang dilakukan oleh Kasi Trantib bersama dengan TNI dan Polri untuk dapat terlibat

nantinya dalam bela negara

3. Melakukan sosialisasi kepada para remaja dan pelajar oleh instansi terkait yang difasilitasi oleh Kasi Trantib dan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut tentang bahaya narkoba bagi Wilayah Kecamatan Bumi Makmur.

5) Rencana Aksi Yang Dilakukan Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan instansi terkait dengan dengan pihak TNI, Polri, para tokoh agama, masyarakat, dalam upaya pentingnya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta penanggulangan kenakalan remaja dan bahaya narkoba kepada usia remaja khususnya.
2. Perlu penekanan dan mensosialisasikan secara berkala pentingnya kelompok masyarakat kaum muda dalam sebagai wujud kepedulian dan kewaspadaan bersama dalam upaya menciptakan ketertiban dan ketentraman keamanan lingkungan.
3. Melakukan sinergitas dan koordinasi dengan TNI dan Polri secara intensif untuk dapat melakukan pencegahan dini dalam hal memerangi Narkoba serta pemberantasan kepada pengedar dan pengguna Narkoba di Kecamatan Bumi Makmur.

e. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 3.25 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			Realisasi 2022
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Memberikan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah ASN yang administrasi perkantorannya terlayani dengan baik	20 orang	18 Orang	100%	20 Orang
2	Pemenuhan sarana dan prasarana kantor	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	323 Unit	323 Unit	100%	205 Unit

3	Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-Undangan yang berlaku	20 Dok	18 Dok	100%	20 Dok
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2023					100%	

Jumlah pegawai pada Kantor Kecamatan Bumi Makmur sebanyak 18 (delapan belas) orang ASN dan 7 (tujuh) orang PTT. Terkait pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran terlayani dengan baik dengan capaian realisasi target indikator sebesar 100 %. Sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik pada saat itu sebanyak 323 unit yang terdaftar dalam inventarisasi barang unit dalam kategori baik.

Kegiatan utama yang dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada tahun anggaran 2023 antara lain penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas atau operasional lainnya serta pembayaran jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor berupa pembayaran honorarium pegawai tidak tetap.





Gambar 17 Pengadaan Sarana dan Prasarana : Perlengkapan dan Peralatan Kantor



Gambar 18 Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Dinas Roda 2 (dua) dan 4 (empat)

1) Analisis Mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Selaku Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan pembinaan dan fasilitasi penanganan gangguan dan keamanan , serta membina kelompok masyarakat

dibidang Umum dan Kepegawaian, yaitu melakukan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran, serta memberikan pelayanan administrasi perkantoran kepada ASN dilingkungan kerja pada Kantor Kecamatan Bumi Makmur.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian tahun anggaran 2023, untuk kegiatan tersebut ditunjang oleh 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 10 (Sepuluh) sub kegiatan dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 567.681.238,-. Pada akhir tahun 2023 capaian realisasi keuangan sub bagian umum dan kepegawaian sebesar Rp. 516.838.815,- atau 91,04% dengan efisiensi kinerja 8,96%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.26 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasubbag Umpeg Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Administrasi umum dan perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	2.360.698	1.584.295	67,11%
2			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	79.596.799	69.685.750	87,55%
3			Penyediaan peralatan rumah tangga	3.489.006	2.443.500	70,03%
4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	8.178.750	5.580.000	68,23%
5			Penyediaan bahan / material	9.981.985	8.891.000	89,07%
6			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	179.940.000	164.911.953	91,65%
7		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	44.580.000	36.559.812	82,01%
8				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	171.024.000	170.130.054

9		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	31.900.000	29.079.800	91,16%
10			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	36.630.000	27.972.651	76,37%
TOTAL				567.681.238	516.838.815	91,04%

Tabel 3.27 Tabel Efisiensi Program , Kegiatan, Sub Kegiatan Kasubbag Umpeg Tahun 2023

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2023	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Administrasi umum dan perangkat daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	100%	67,11%	32,89%	
2			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	87,55%	12,45%	
3			Penyediaan peralatan rumah tangga	100%	70,03%	29,97%	
4			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	68,23%	31,77%	
5			Penyediaan bahan / material	100%	89,07%	10,93%	
6			Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	91,65%	8,35%	
7		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	82,01%	17,99%
8				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	99,48%	0,52%
9			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	91,16%	8,84%

10			Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perzinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	100%	76,37%	23,63%
TOTAL RATA - RATA				100%	82,26%	17,74%

3) Kendala / Permasalahan yang di hadapi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Adapun kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah :

1. Kurangnya petugas staf terutama ASN dalam pengelolaan kearsipan terutama dalam mengerjakan tugas-tugas inventarisasi kearsipan, tata kelola surat menyurat masuk dan keluar.
2. Terlalu banyak regulasi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang sehingga dalam pelaksanaannya kurang efektif dan efisien
3. Terbatasnya pendanaan untuk pengadaan barang sarana dan prasarana sehingga untuk pengadaannya tidak dapat dianggarkan
4. Kurangnya partisipasi ASN dalam pemenuhan data-data kepegawaian yang diperlukan pada saat finalisasi usulan tertentu yang harus dilengkapi.

4) Solusi permasalahan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Melakukan usulan penambahan pegawai staf ASN yang akan ditugaskan nantinya untuk mengelola kearsipan yang diharapkan nantinya punya keahlian khusus menyusun arsip, terkait dalam hal penataan arsip dengan mengadakan pemilahan yang jelas mana arsi statis dan yang dinamis , serta didukung adanya sarana dan prasarana yang memadai.
2. Melakukan sosialisasi dan promosi terkait pemanfaatan aplikasi sosialita bagi penyedia barang dan jasa untuk dapat berkontribusi dan mengikutsertakan para penyedia jasa dalam hal ini pngusaha UMKN dalam pembangunan daerah di Kecamatan Bumi Makmur.
3. Meinventarisir secara terperinci kebutuhan sarana dan prasarana yang di dibutuhkan kantor

4. Penerapan disiplin yang maksimal dan penegasan langsung oleh atasan langsung dalam pemenuhan kebutuhan akan data-data kepegawaian yang diperlukan pada batasan waktu tertentu.

5) Rencana Aksi yang akan dilakukan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Memanfaatkan pegawai PTT yang ada untuk membantu dalam pengelolaan kearsipan pada Kantor Kecamatan Bumi Makmur.
2. Melakukan kerjasama terutama para penyedia jasa para UMKN agar dapat bergabung dalam aplikasi Sosialita Katalog lokal yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Bagian Pelayanan barang dan jasa yang berada di Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Laut untuk memudahkan Staf ASN pada Kecamatan Bumi Makmur dalam memanfaatkan dan menggunakan aplikasi Sosialita dan mempergunakan dalam penatausahaan keuangan daerah
3. Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan pihak lain terkait pengadaan barang sarana dan prasarana kantor
4. Meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan kepada ASN dalam mendukung tertibnya administrasi kepegawaian

f. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Tabel 3.88 Tabel Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	TAHUN 2023			Realisasi 2022
			Target	Realisasi	Persentase Capaian	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen
2	Menyusun laporan kinerja yang disusun sesuai dengan ketentuan	Jumlah laporan kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen
Rata - Rata Capaian Kinerja Tahun 2023					100%	

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan pada Kecamatan Bumi Makmur yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku berupa Dokumen Renstra 2018-2023, Dokumen Renja 2024, Dokumen Renja Perubahan Tahun 2023, Dokumen RKA Tahun 2024 dan RKA Perubahan Tahun 2023, Dokumen DPA dan DPA-Perubahan 2023 . Dengan demikian realisasi capaian target sesuai target (100%).

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Laporan Kinerja Pemerintahan 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2023 , Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2023 dan Laporan Keuangan semesteran, triwulan, bulanan dan prognosis 2023. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai 100%

1) Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Perencanaan dan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Kecamatan Bumi Makmur dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang yaitu 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dengan kegiatan yang sesuai dengan tujuan kinerja organisasi maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan kegiatan perencanaan kinerja dan keuangan, laporan keuangan dan laporan kinerja.

2) Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2023, sub bagian perencanaan dan keuangan ditunjang oleh 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 3.032.963.421, capaian realisasi keuangan sub bagian perencanaan dan keuangan mencapai 80,16% atau dengan anggaran Rp. 3.032.963.421,- terealisasi sebesar Rp. 2.431.260.089,-. dengan efisiensi kinerja 19,84%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.29 Tabel Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Realisasi Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2023
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.670.921	2.430.126.089	80,16%
2.			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	1.292.500	1.134.000	87,74%
TOTAL				3.032.963.421	2.431.260.089	80,16%

**Tabel 3.29 Tabel Efisiensi Program , Kegiatan,Sub Kegiatan Kasubbag
Perencanaan dan Keuangan Tahun 2023**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA 2023	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten / Kota	Administrasi keuangan perangkat daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	80,16%	19,84%
2.			Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	100%	87,74%	12,26%
TOTAL				100%	83,95%	16,05%

3) Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Terbatasnya staf /ASN yang menangani kegiatan pembuatan laporan perencanaan SKPD berupa Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).

2. Kurangnya pengetahuan dalam hal pendidikan dan pelatihan bagi staf subbag perencanaan dan keuangan dalam pemenuhan tugas-tugas pekerjaan terkait informasi peraturan perundangan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk menyusun laporan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan manual maupun aplikasi yang telah disediakan oleh kemendagri RI, BPKP dan Kemenkeu RI.
3. Kesulitan mengumpulkan Dokumen – dokumen Perencanaan dan Pelaporan Keuangan untuk tahun sebelumnya dikarenakan intensnya pergeseran jabatan Kasubag Perencanaan dan Keuangan di Kecamatan Bumi Makmur sehingga kesulitan dalam hal penyusunan Perencanaan tahun berjalan dan berikutnya.

4) Solusi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Melakukan penambahan personel staf/ASN subbag Perencanaan dan Keuangan yang menangani kegiatan laporan perencanaan SKPD (Laporan Renja APBD dan Renja Perubahan APBD, Laporan Perjanjian Kinerja (PK) Laporan Monev per Triwulan, serta Laporan Keuangan SKPD (Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Laporan Akhir Tahun).
2. Melakukan usulan pagu anggaran kepada SKPD terkait mengenai pendidikan dan pelatihan bagi staf/ASN Subbag Perencanaan dan Keuangan mengikuti Bimbingan teknis, Diklat bidang perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah dalam rangka peningkatan wawasan personil di bidang perencanaan.

5) Rencana aksi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan

1. Melakukan bimbingan dan transfer *knowledge* kepada staf/ASN subbag perencanaan dan keuangan dalam rangka pemerataan pembagian tugas dan pekerjaan sesuai peruntukannya agar penyelesaian pekerjaan menjadi tepat waktu sesuai aturan perundangan- undangan.
2. Melakukan pemanfaatan staf/ASN perencanaan dengan menggunakan

kemampuan dalam penyajian data-data berupa hardware dan software untuk penyusunan perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan daerah sebagai SKPD yang mempunyai kewajiban melaporkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

3. Mengumpulkan dan mengolah kembali data – data Perencanaan dan Pelaporan untuk selanjutnya disimpan sebagai bahan referensi untuk penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan yang akan datang.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2023 untuk eselon IV mencapai 95,15%. Untuk lebih jelasnya Realisasi Target Indikator Kinerja eselon IV tahun 2022-2023 secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.30 Realisasi Target Indikator Kinerja Eselon IV Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2022 – 2023

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022			Tahun 2023		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%
2.	Jumlah desa yang di fasilitasi dengan baik pada penyelenggaraan pemilu pilkada dan pemilihan kepala desa serta penjangingan aparat desa dan BPD	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%
3.	Jumlah desa yang data Kependudukannya terverifikasi dengan akurat	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%
4.	Jumlah Pelatihan Pasukan Paskibraka	1 kali	1 kali	100%	1 Kali	1 Kali	100%
5.	Jumlah kelompok masyarakat yang berhasil memasarkan hasil produksinya	11 Kelp	11 Kelp	100%	11 Kelp	11 Kelp	100%
6.	Jumlah desa yang berhasil menyusun profil desa dengan baik	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%
7.	Jumlah desa yang mengelola keuangannya dengan baik	11 Desa	11 Desa	100%	11 Desa	11 Desa	100%

8.	Jumlah fasilitasi pelaksanaan kegiatan musrenbang tingkat Kecamatan/Musdes/Musdesus	2 Kali	2 Kali	100%	2 kali	0 Kali	0%
9.	Jumlah kelompok organisasi masyarakat yang dibina dibidang sosial (Karang Taruna, LAD lembaga Adat Desa	5 Organisasi	0 Organisasi	0%	5 Organisasi	5 Organisasi	100%
10.	Jumlah kegiatan dibidang sosial, keagamaan, kebudayaan dan olah raga yang sesuai SOP	14 Keg	14 Keg	100%	14 Keg	14 Keg	100%
11.	Jumlah masyarakat tidak mampu yang difasilitasi penyaluran bantuannya	0 KK	0 KK	0%	225 KK	210 keg	93,33%
12.	Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP	16 Pelayanan	16 Pelayanan	100%	16 Pelayanan	16 Pelayanan	100%
13.	Jumlah pengaduan masyarakat yang di fasilitasi	2 aduan	0 Aduan	100%	2 Aduan	0 Aduan	100%
14.	Jumlah Data informasi Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN)	0 Dokumen	0 Dokumen	0%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
15.	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang difasilitasi	4 Kali	4 Kali	100%	4 Kali	4 Kali	100%
16.	Jumlah kelompok organisasi masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban yang aktif	11 Kelp	11 Kelp	100%	11 Kelp	11 Kelp	100%
17.	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang dimonitoring	12 Kali	12 Kali	100%	12 Kali	12 Kali	100%
18.	Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik	20 Org	20 Org	100%	18 org	18 org	100%
19.	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	205 Unit	205 Unit	100%	323 unit	323 unit	100%
20.	Jumlah ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawaian dengan baik dan benar sesuai dengan perundang-Undangan yang berlaku	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	18 Dokumen	18 Dokumen	100%

21	Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
22	Jumlah laporan kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai ketentuan	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
Rata-Rata Capaian				86,36%			95,15%

7. Perbandingan realisasi dengan target

Dari hasil realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ada beberapa capaian yang menurun yaitu Menurunnya jumlah pengaduan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur tahun 2023 sebanyak 0 kejadian dari target 2 kejadian. Hal ini dikarenakan masyarakat sudah merasa puas dalam mendapatkan pelayanan karena tidak dikenakan tarif biaya (gratis). Terjadi kenaikan jumlah penerima bantuan sosial di masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur tahun 2023 sebanyak 210 Kepala Keluarga (KK) dari target 225 dibandingkan di tahun 2022 yang tidak ada. Adapun permasalahan yang sering terjadi dari hasil verifikasi oleh petugas pendataan lapangan yang tidak memenuhi persyaratan pada tahap evaluasi akhir pendataan ulang, para penerima bantuan sosial pindah kedesa lain tanpa adanya pemberitahuan lebih awal kepada petugas dilapangan, adanya perbedaan nama penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dengan ejaan penulisan nama / huruf, adanya perbedaan data yang disampaikan oleh Data Statistik yang belum update ketika disanding dengan data dari Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut, ternyata lebih dominan data yang keluar kepada calon penerima hibah adalah data Statistik.

Dengan terbukanya informasi publik berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

8. Perbandingan realisasi dengan Realisasi Terkait

Realisasi kinerja berdasarkan rata-rata capaian tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 untuk kinerja eselon IV mengalami kenaikan dari **86,36%** menjadi **95,15%**.

9. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Jumlah Kegiatan di bidang Sosial, Keagamaan, Kebudayaan dan olahraga yang sesuai SOP dari target 3 kegiatan terlaksana 3 kegiatan (100 %) yaitu pelaksanaan Pengiriman Kafilah MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 di Kecamatan Bati-Bati, kegiatan buka puasa bersama/safari ramadhan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut beserta unsur forkompimda serta kepala SKPD dengan masyarakat Kecamatan Bumi Makmur. Sejalan dengan Misi dan Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut untuk pelaksanaan hibah sebanyak 1 (satu) Milyar khususnya di Kecamatan Bumi Makmur dapat tersalurkan pada Kelompok, organisasi masyarakat pada bidang keagamaan, kepemudaan, seni dan budaya dari target 14 (empat belas) kegiatan dapat terserap tepat sasaran secara penuh 1 (satu) Miliar kepada yang menerima bantuan Hibah dari Pemerintah Daerah tersebut yang difasiltasi oleh pihak Kecamatan Bumi Makmur.

10. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja.

Dari 6 (enam) program, 9 (Sembilan) kegiatan, dan 21 (Dua Puluh Satu) sub kegiatan yang diamanatkan pelaksanaannya kepada Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023 yaitu Pagu APBD Murni Awal sebesar Rp. 4.873.725.756,- setelah APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 4.983.255.766,-- terjadi kenaikan anggaran sebesar 0,97 %. Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp. 4.285.077.254,- dengan capaian sebesar 85,99 % dari pagu Perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Bumi Makmur yang ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.31 Tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Bumi Makmur Tahun 2023

Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi			
	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Fisik TTB (%)	Keuangan	
			(%)	(Rp)			Rp	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.491.114.649	3.600.644.659	100,00%	3.600.644.659	99,92%		2.948.098.904,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.032.963.421	3.032.963.421	100,00%	3.032.963.421	100,00%		2.431.260.089,00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.031.670.921	3.031.670.921	100,00%	3.031.670.921	100,00%	60,84%	2.430.126.089,00	80,16%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.292.500	1.292.500	100,00%	1.292.500	100,00%	0,03%	1.134.000,00	87,74%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	188.269.228	283.547.238	100,00%	283.547.238	100,00%		253.096.498,00	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.360.698	2.360.698	100,00%	2.360.698	100,00%	0,05%	1.584.295,00	67,11%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.300.774	79.596.799	100,00%	79.596.799	100,00%	1,60%	69.685.750,00	87,55%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.489.006	3.489.006	100,00%	3.489.006	100,00%	0,07%	2.443.500,00	70,03%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.178.750	8.178.750	100,00%	8.178.750	100,00%	0,16%	5.580.000,00	68,23%
Penyediaan Bahan/Material	0	9.981.985	100,00%	9.981.985	100,00%	0,20%	8.891.000,00	89,07%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.940.000	179.940.000	100,00%	179.940.000	100,00%	3,61%	164.911.953,00	91,65%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	201.352.000	215.604.000	100,00%	215.604.000	100,00%		206.689.866,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.580.000	44.580.000	100,00%	44.580.000	100,00%	0,89%	36.559.812,00	82,01%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	156.772.000	171.024.000	100,00%	171.024.000	100,00%	3,43%	170.130.054,00	99,48%

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	68.530.000	68.530.000	100,00%	68.530.000	95,72%		57.052.451,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	31.900.000	31.900.000	100,00%	31.900.000	100,00%	0,64%	29.079.800,00	91,16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	36.630.000	36.630.000	100,00%	36.630.000	92,00%	0,68%	27.972.651,00	76,37%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	16.379.344	16.379.344	100,00%	16.379.344	100,00%		11.836.500,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	16.379.344	16.379.344	100,00%	16.379.344	100,00%		11.836.500,00	
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	16.379.344	16.379.344	100,00%	16.379.344	100,00%	0,33%	11.836.500,00	72,26%
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	60.663.120	60.663.120	100,00%	60.663.120	85,81%		48.096.360,00	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	60.663.120	60.663.120	100,00%	60.663.120	85,81%		48.096.360,00	
Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	11.535.000	11.535.000	100,00%	11.535.000	85,00%	0,20%	8.745.000,00	75,81%
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	49.128.120	49.128.120	100,00%	49.128.120	86,00%	0,85%	39.351.360,00	80,10%

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	6.923.350	6.923.350	100,00%	6.923.350	100,00%		6.760.000,00	
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6.923.350	6.923.350	100,00%	6.923.350	100,00%		6.760.000,00	
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6.923.350	6.923.350	100,00%	6.923.350	100,00%	0,14%	6.760.000,00	97,64%
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.282.147.973	1.282.147.973	100,00%	1.282.147.973	99,58%		1.265.285.490,00	
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.282.147.973	1.282.147.973	100,00%	1.282.147.973	99,58%		1.265.285.490,00	
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.973.800	99.973.800	100,00%	99.973.800	100,00%	2,01%	99.243.000,00	99,27%
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1.128.691.673	1.128.691.673	100,00%	1.128.691.673	100,00%	22,65%	1.126.094.000,00	99,77%
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	53.482.500	53.482.500	100,00%	53.482.500	90,00%	0,97%	39.948.490,00	74,69%

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	16.497.320	16.497.320	100,00%	16.497.320	33,34%		5.000.000,00	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.497.320	16.497.320	100,00%	16.497.320	33,34%		5.000.000,00	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.500.000	5.500.000	100,00%	5.500.000	100,00%	0,11%	5.000.000,00	90,91%
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.997.320	10.997.320	100,00%	10.997.320	0,00%	0,00%	0,00	0,00%
	4.873.725.756	4.983.255.766	100,00%	4.983.255.766		99,44%	4.285.077.254	85,99%

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Anggaran dan Realisasi APBD 2023

Setelah pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan anggaran belanja sebesar Rp. 4.983.255.766,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 4.285.077.254,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85,99 % dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 698.178.512,- (14,01%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 38 sebagai berikut:

Tabel 3.32 .Realisasi Anggaran Belanja Kantor Kecamatan Bumi Makmur Tahun Anggaran 2023

No.	URAIAN	PAGU MURNI 2023	PAGU PERUBAHAN 2023	REALISASI (Rp).	Persentase
1	BELANJA DAERAH	4.873.725.756	4.983.255.766	4.285.077.254	85,99%
2	BELANJA OPERASI	4.860.546.726	4.935.348.211	4.239.177.254	85,89%
3	BELANJA MODAL	13.179.030	47.907.555	45.900.000	95,81%
	SISA ANGGARAN			698.178.512	14,01%

2. Anggaran dan Realisasi APBD 2023 Berdasarkan Program dan Kegiatan

Tabel 3.33. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kantor Kecamatan Bumi Makmur

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Program	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Persentase
1	Meningkatnya tata kelola perencanaan pelaporan keuangan SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.032.963.421	2.431.260.089	80,16%
2	Meningkatnya pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian		567.681.238	516.838.815	91,04%
3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	16.379.344	11.836.500	72,26%

		Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan Kelurahan	60.663.120	48.096.360	79,28%
		Program koordinasi keteraman dan ketertiban umum	6.923.350	6.760.000	97,64%
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	1.282.147.973	1.265.285.490	98,68%
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16.497.320	5.000.000	30,31%
JUMLAH					85,99%

3. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan 2023

Pada tahun 2022 ada 4 (empat) Program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan, dibandingkan tahun 2023 jumlah program 6 (enam) dan 9 (Sembilan) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) sub kegiatan. Adapun untuk anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 3.355.323.542,- yang mengalami kenaikan pagu sebesar Rp, 1.627.932.224,- dibandingkan anggaran tahun 2023 yaitu sebesar Rp.4.983.255.766,- .Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2022 – 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.34 Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Bumi Makmur TA. 2022-2023

TAHUN 2022			TAHUN 2023		
Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
4	7	11	6	9	21
TOTAL ANGGARAN : Rp. 3.355.323.542			TOTAL ANGGARAN : Rp. 4.983.255.766		

Adapun realisasi Belanja pada tahun 2023 sebesar Rp. 4.285.077.254,- dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 3.030.637.448,-. mengalami kenaikan realisasi dibanding tahun 2023. Pada tahun 2023 realisasi pendapatan tidak dapat

direalisasikan karena Kecamatan sudah tidak diperkenankan memungut IMB Non Komersil. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.35 Realisasi Belanja APBD Tahun 2022 Terhadap 2023

Kode Rekening	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022
5	BELANJA DAERAH	4.285.077.254	3.032.537.448
5.1	BELANJA OPERASI	4.239.177.254	3.032.537.448
5.1.01	Belanja Pegawai	2.430.126.089	2.585.587.558
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	809.051.165	446.949.890
5.1.05	Belanja Hibah	1.000.000.000	0
	JUMLAH	3.032.537.448	3.671.847.481
	BELANJA OPERASI		
5.2	BELANJA MODAL	45.900.000	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan	45.900.000	0
	dan Mesin		
	JUMLAH	45.900.000	0
	BELANJA MODAL		

Adapun perbandingan realisasi APBD 2022 terhadap 2023, dapat dilihat bahwa untuk pendapatan realisasi tahun 2023 sebesar Rp.0,- atau 0%, karena adanya pengalihan pengelolaan pendapatan berupa hasil retribusi daerah berupa pembuatan ijin mendirikan bangunan (IMB) non komersial tidak lagi diterima karena hal tersebut sudah dikelola oleh PTSP Kabupaten Tanah Laut.

Tabel 3.36 Perbandingan realisasi belanja APBD 2022 terhadap APBD 2023 pada Belanja Tidak Langsung dan Langsung Kecamatan Bumi Makmur

NO	Uraian	Realisasi 2023	%	Realisasi 2022	%	Kenaikan/ penurunan
1.	Belanja Tidak Langsung :					
	Belanja Pegawai	2.430.126.089	80,16	2.585.587.558	92	(11,84)
	Belanja Hibah	1.000.000.000	100	0	0	100
2.	Belanja Langsung :					
	Belanja Barang dan Jasa	809.051.165	89,53	446.949.890	82,02	7,51
	Belanja Modal	45.900.000	95,81	0	0	0

Perbandingan realisasi Sedangkan perbandingan realisasi APBD 2022 terhadap 2023 untuk belanja langsung tidak langsung pada belanja pegawai mengalami penurunan sebesar 11,84 % dikarenakan adanya mutasi pegawai, sedangkan belanja hibah adanya kenaikan sebesar 100 % dari tahun 2022 terhadap tahun 2023, dikarenakan pada tahun 2022 tidak ada pelaksanaan kegiatan hibah.

Perbandingan realisasi APBD tahun 2022 dengan tahun 2023 untuk belanja langsung pada belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar 7,51 % di karenakan adanya pengadaan bahan / alat material kegiatan kantor, adanya penambahan pagu perjalanan dinas, kegiatan rapat berupa konsumsi , pemeliharaan kendaraan dinas, jasa komonikasi. Sedangkan untuk belanja modal tahun 2022 tarhadap tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 95,81 % dikarenakan adanya penambahan pagu untuk pengadaan peralatan dan mesin berupa peralatan personal komputer.

Untuk SKPD Kecamatan Bumi Makmur, dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2023 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja fisik dan keuangan dari keseluruhan program dan kegiatannya. Walaupun masih ada beberapa kegiatan yang capaiannya masih belum maksimal, akan tetapi secara umum tidak menjadi masalah yang berarti

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. LKj ini memuat perencanaan dan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan.

Penyusunan LKJ ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis telah dapat dilaksanakan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Dan diharapkan dapat menjadi pemicu dan pemacu bagi seluruh aparatur pemerintah di lingkungan SKPD Kecamatan Bumi Makmur untuk lebih produktif lagi dimasa yang akan datang sehingga Visi dan Misi SKPD Kecamatan Bumi Makmur dapat terwujud. Oleh karena itu mulai saat ini upaya untuk meningkatkan kemampuan, komitmen, keterampilan dan konsentrasi harus terus di tumbuhkan. Tantangan kedepan tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin kompleks dan rumit

Berdasarkan dari penjelasan LKJ yang telah dibuat, maka beberapa hal dapat disimpulkan :

1. Capaian sasaran kinerja Kecamatan Bumi Makmur pada Tahun 2023 secara keseluruhan sudah cukup baik, dan dari 3 (indikator) sasaran sudah tercapai semuanya walaupun hasilnya masih perlu perbaikan dimasa yang akan datang.
2. Capaian IKU pada tahun ke 5 Renstra (2018 – 2023) adalah 100 %, dibuat berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan, berupa 535 lembar kuisisioner yang dibagikan, sehingga didapat nilai untuk IKM Tahun 2023 adalah 90,20 %, dan termasuk kategori **Sangat Memuaskan**.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Berhasilnya pelaksanaan kegiatan pada SKPD Kecamatan Bumi Makmur tentunya sangat ditunjang oleh kualitas sumber daya manusia aparaturnya, sumber dana serta adanya dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak terkait, namun tidak pula dipungkiri masih terdapat kelemahan-kelemahan seperti masih terbatasnya tenaga yang profesional jika dibandingkan dengan beban kerja yang harus diselesaikan.

Adapun strategi Peningkatan Kinerja untuk mewujudkan peningkatan Pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan :

1. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Bumi Makmur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
2. Mengoptimalkan dan meningkatkan potensi, Sumber Daya Manusia (SDM), dana dan sarana prasarana yang ada untuk menyediakan pelayanan masyarakat yang prima dengan dukungan program yang jelas dan terukur.
3. Mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui organisasi masyarakat ataupun individu masyarakat untuk mewujudkan Kecamatan Bumi Makmur yang kondusif dengan masyarakat yang patuh terhadap aturan.
4. Meningkatkan kerjasama antara Kecamatan, instansi terkait, dan pihak swasta dalam melaksanakan fungsi pelayanan publik dan pembangunan.

Pada akhirnya, semoga dengan adanya Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023, dapat memberikan manfaat dan untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bumi Makmur, 29 Januari 2024

Camat Bumi Makmur ,



SAHIDANOR, S.Sos, M.Si

Pembina TK I / (IV/b)

NIP. 19661106 198601 1 002

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. IKU
2. PERNYATAAN HASIL REVIU
3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
4. *CASCADING* / POHON KINERJA
5. CAPAIAN PER TRIWULAN (1 - 4)
6. MONEV RENSTRA
7. MATRIK KESELARASAN